



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016



KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017

Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Bengkulu Tengah, Maret 2017
Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah

MUN GUMIRI, S.IP, M.H
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19630515 198503 1 007

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bengkulu Tengah, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap jenjang pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya

berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel guna mewujudkan “Good and Clean Governance”. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 ini dibuat untuk memenuhi maksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Untuk itu laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan menegakkan hukum baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kepada semua pihak dan khususnya Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB serta Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Karang Tinggi, Maret 2017
BUPATI BENGKULU TENGAH

DR. H. FERRY RAMLI, S.H.,M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi serta pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017 yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 yang dipertanggungjawabkan secara periodik.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bengkulu Tengah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 ini adalah Laporan tahun Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017. Data yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah data sekunder berupa RPJMD, Laporan Realisasi Perhitungan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Kinerja Dinas/Instansi dalam Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016.

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap

pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja suatu organisasi, yakni sebagai berikut :

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkulu Tengah dapat tercapai. IKU Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-130 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 800-298 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 37 Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 22 (dua puluh dua) indikator atau sebanyak 59,45% berkriteria Sangat Baik, 6 (enam) indikator atau 16,21% berkategori Tinggi, 3 (tiga) indikator atau 8,1% berkategori sedang, 5 (lima) indikator atau 13,51% berkategori rendah dan 1 (satu) indikator atau 2,70%% tercapai dengan kategori sangat rendah. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan perlu mendapatkan perhatian pada tahun berikutnya.

Untuk 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya masuk kriteria **Sangat Baik**, yaitu indikator yang pencapaiannya 90,1% meliputi:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
2. Jumlah Perda yang dikeluarkan
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan.
6. Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar
7. Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan
8. Jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah
9. Opini Pemeriksaan BPK
10. Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam

11. Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar
12. Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar
13. Rasio guru/murid
14. Angka melek huruf
15. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
16. Persentase penanganan balita gizi buruk
17. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga
18. Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten
19. Persentase peserta KB aktif
20. Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja
21. Jumlah Koperasi
22. Jumlah Dokumen Perizinan yang dikeluarkan

Sedangkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria **Tinggi** yaitu indikator yang pencapaian nilainya 75,1 – 90,00% meliputi:

1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar
2. Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
3. Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih
4. Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam
5. Rata-rata Peningkatan produksi padi per hektar/musim tanam
6. Persentase koperasi aktif

Selanjutnya 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria **Sedang** yaitu indikator yang pencapaian nilainya 65,1 – 75,00% adalah :

1. Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi
2. Jumlah gedung/kantor yang dibangun
3. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria **Rendah** yaitu indikator yang pencapaiannya 50,1 – 65,00% yang meliputi:

1. Proporsi panjang jalan kondisi baik
2. Panjang jalan yang terbangun
3. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

4. Jumlah UMKM

5. Jumlah perusahaan menengah dan besar

serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersedianya jaringan internet dan Web di beberapa SKPD kriterianya **Sangat Rendah**.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ke depan. Walaupun sebagian besar IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Selain permasalahan pada pencapaian target IKU seperti tersebut diatas, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Infrastruktur Jalan, Persentase Jumlah Penduduk Miskin, Pelayanan Publik masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Peran pemerintah lainnya mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok- kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

sendiri, ini berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja , hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	ii
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Demografi	3
1. Geografi, Topografi dan Iklim	3
2. Aspek Demografi	14
3. Organisasi Perangkat Daerah	16
C. Kondisi Ekonomi Daerah	16
D. Keragaman Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	21
E. Isu Strategis	22
BAB II Perencanaan Kinerja	33
A. Rencana Strategis	33
1. Visi dan Misi	34
2. Tujuan dan Sasaran	36
3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas	47
B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016	49
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	52
BAB III Akuntabilitas Kinerja	54
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	55
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	57
1. Sasaran terselenggaranya Tata Pemerintah yang Baik	57
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	66
3. Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan	

Infrastruktur _____	70
4. Sasaran Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan _____	76
5. Sasaran Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi _____	81
6. Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan _____	85
7. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat _____	94
8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemudah dan Olaraga _____	100
9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Ketenagakerjaan _____	103
10. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih _____	107
11. Sasaran Meningkatnya Usaha Pertanian _____	110
12. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM _____	114
13. Sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Industri _____	120
C. Akuntabilitas Anggaran _____	122
D. Efisiensi Sumber Daya _____	130
 BAB IV Penutup _____	 133

LAMPIRAN :

- Lampiran 1. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016
- Lampiran 2. Dokumen Keuangan Tahun 2016
- Lampiran 3. Struktur Organisasi Pemda Bengkulu Tengah
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Lampiran 5. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah	7
Tabel I.2a	Luas Masing-masing Jenis Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tengah	8
Tabel I.2b	Luas Masing-masing Jenis Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tengah (lanjutan)	8
Tabel I.3	Rencana Pola Ruang Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032	10
Tabel I.4	Jenis Tanah dan Luas di Kabupaten Bengkulu Tengah	11
Tabel I.5	Jenis Tanah Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah	12
Tabel I.6	Rata-rata Suhu Menurut Buland di Kabupaten Bengkulu Tengah	13
Tabel I.7	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014	15
Tabel I.8	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Pada Kantor TTs Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah	27
Tabel I.9	Upah Minimum Regional per bulan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2010 - 2015	27
Tabel I.10	Dimensi Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Tengah	29
Tabel I.11	Proporsi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Bengkulu Tengah	30
Tabel II.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	46
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2016	50
Tabel II.3	Program Untuk Sasaran Pencapaian Tahun 2016	53
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	53
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	55
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terselenggaranya Tata	

Pemerintah yang Baik	58
Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	67
Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur	71
Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Suber-sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	76
Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	82
Tabel III.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan	87
Tabel III.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	95
Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	101
Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Ketenagakerjaan	104
Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih	108
Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Usaha Pertanian	112
Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	121
Tabel III.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Investasi	97
Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016	123

Tabel III.17 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	_____	124
Tabel III.18 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2016	____	124
Tabel III.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016	_____	127
Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	_____	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah	4
Gambar I.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah	5
Gambar I.2	Objek Wisata Bunga Rafflesia, Gunung Bungbuk, Sungai Suci Dan Wahana Surya Bengkulu Tengah	5
Gambar I.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah	6
Gambar I.4	Bupati Bengkulu Tengah Meninjau Lahan Pembangunan Pusat Perkantoran di Kabupaten Bengkulu Tengah	14
Gambar I.5	Ragam Kehidupan Masyarakat di Bengkulu Tengah	18
Gambar I.6a	PNS Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	22
Gambar I.6b	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Gambar I.7	Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin	23
Gambar I.8	Panen Raya di Bengkulu Tengah	27
Gambar I.9	Bapak Sekda Menerima Penghargaan National Procurement Award 2016 dari LKPP-RI	32
Gambar II.1	Program-Program Prioritas Beserta Korelasi Terhadap Misi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017	49
Gambar III.1	Bimtek SAKIP di lingkungan OPD Kabupaten Bengkulu Tengah	62
Gambar III.2	HUT Kabupaten Bengkulu Tengah ke- 8 tahun 2016	66
Gambar III.3	Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik	71
Gambar III.4	Infrastruktur Jalan Terbangun	72
Gambar III.5	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi	73
Gambar III.6	Pembangunan Gedung/Kantor Baru di Pusat Perkantoran Rena Semanek Kabupaten Bengkulu Tengah	75
Gambar III.7	Grafik Perkembangan PAD Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2012 s/d Tahun 2016	78

Gambar III.8 Penghargaan Opini WTP dari BPK-RI _____	75
Gambar III.9 Grafik Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan _____	86
Gambar III.10 Grafik Jumlah Sekolah, Guru, Rasio Guru/Murid guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah _____	92
Gambar III.11 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas _____	95
Gambar III.12 Grafik Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Rafflesia dari tahun 2009 s/d 2015 _____	109
Gambar III.13 Bapak Bupati Bengkulu Tengah Melaksanakan Panen Raya ____	111
Gambar III.12 Grafik Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan _____	111

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawab dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Tengah. Serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan persyaratan untuk mewujudkan aspirasi

Bab I Pendahuluan
Berisi :

- A. Latar Belakang*
- B. Gambaran Umum Demografi*
- C. Kondisi Ekonomi Daerah*
- D. Keragaman SDM Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah*
- E. Isu Strategis*

masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya alam dengan didasari suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Penyusunan Laporan kinerja Tahunan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan Kinerja

merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Organisasi dalam satu (1) tahun Anggaran.

Perubahan yang signifikan terjadi sejak dintrodisirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di ubah lagi dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah:

1. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
2. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Jiwa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah Otonom menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan menurut pasal 13 Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di pasal 1 ayat 30 di sebutkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagai unsur pelaksana otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggungjawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk mencapai Good Governance.

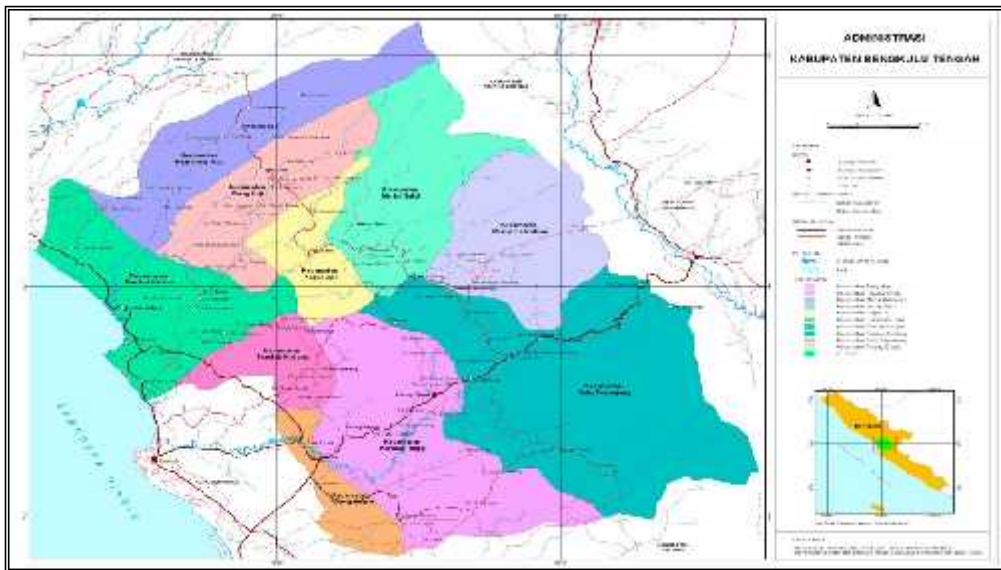
Guna mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, serta untuk mempertanggungjawabkan tugas, wewenang, amanat dan sumber daya yang telah dimanfaatkan, diperlukan suatu media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja.

B. Gambaran Umum Demografi

1. Geografis, Topografi dan Iklim

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur perlintasan antara Kota Bengkulu dan Kota Lubuk Linggau, juga merupakan kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Bengkulu Tengah terletak diantara koordinat 102°.11'.24"-102°.37'.12" BT dan 3°.28'.48" - 3°.51'.36" LS. Sedangkan secara administrasi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah berbatasan dengan :

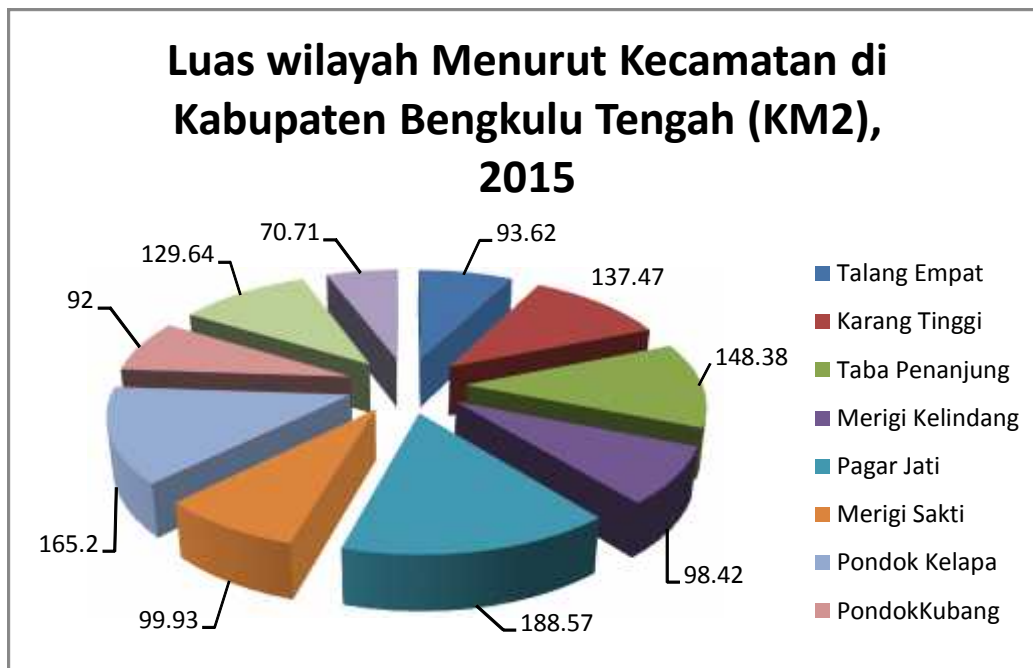
- | | |
|--------------------|---|
| a. Sebelah Utara | : Berbatas dengan Kab. Bengkulu Utara |
| b. Sebelah Timur | : Berbatas dengan Kabupaten Kepahiang |
| c. Sebelah Selatan | : Berbatas dengan Kabupaten Seluma |
| d. Sebelah Barat | : Berbatas dengan Kota Bengkulu dan Samudera Hindia |



Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah berdasarkan *Geografic Information System* (GIS) 1.429,14 Km² (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat belas kilometer persegi) terdiri atas luas daratan 1.223,94 Km² (seribu dua ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh empat kilometer persegi) dan wilayah laut dengan luas 205,2 (dua ratus lima koma dua kilometer persegi), yang meliputi 10 Kecamatan 142 desa dan 1 Kelurahan, dengan rincian masing-masing luas wilayah kecamatan dibandingkan total luas wilayah keseluruhan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Kecamatan Pagar Jati (15%), Kecamatan Pondok Kelapa (13%), Kecamatan Taba Penanjung (12%), dan yang memiliki luas wilayah terkecil, yaitu Kecamatan Bang Haji (6%).

Gambar I.2 ini memperlihatkan luas kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Tengah, (sumber data BPS, Bengkulu Tengah Dalam Angka tahun 2016).

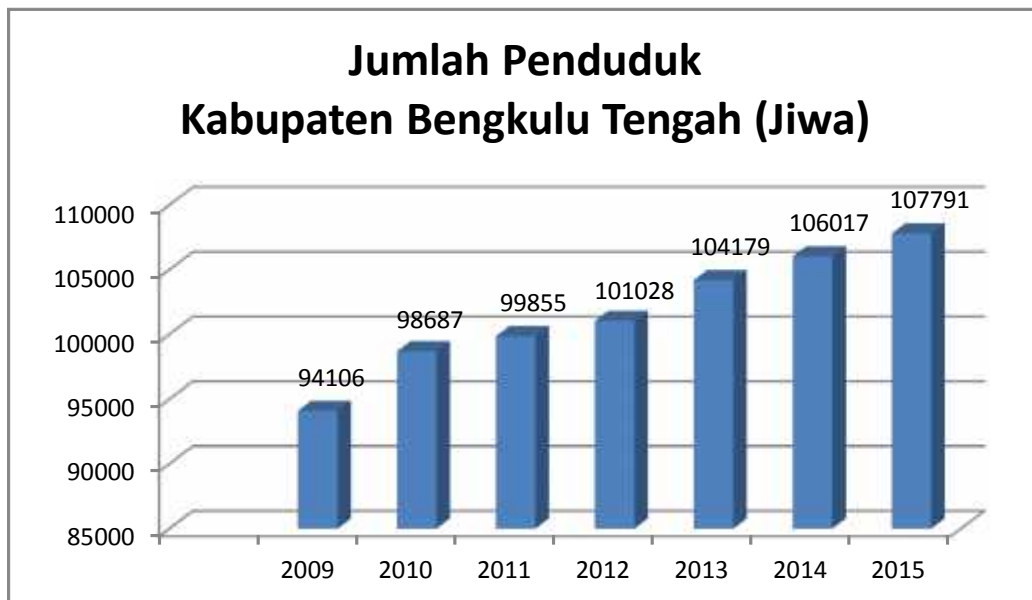


Gambar I.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan



Gambar I.3 Objek Wisata Bunga Rafflesia, Gunung Bungkok, Pantai Sungai Suci dan Wahana Wahana Surya Bengkulu Tengah

Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2015 mencapai 107.791 jiwa, (sumber BPS, Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016), sedangkan pada tahun 2014 mencapai 106.017 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2015 sebesar 105. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kecamatan Talang Empat dan Pondok Kubang yaitu 109. Sedangkan rasio jenis kelamin dibawah 105 ada di Kecamatan Merigi Kelindang, Pagar Jati, Merigi Sakti dan Pematang Tiga masingmasing 104, 101, dan 102 untuk Merigi Sakti dan Pematang Tiga, sedangkan perkembangan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2009 s/d 2015 dapat dilihat pada gambar I.3 dibawah ini.



Gambar I.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah (jiwa)
(2009 – 2015)

Dari jumlah 107.791 jiwa penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah tersebar ke 10 (sepuluh) kecamatan dengan sebaran yang tidak merata. Kecamatan Pondok Kelapa merupakan kecamatan dengan sebaran yang paling padat dengan jumlah 25.64% penduduk, di susul dengan kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Taba Penanjung. Sedangkan kecamatan dengan distribusi kepadatan penduduk yang paling kecil adalah kecamatan Merigi Sakti dengan persentase 5.40% penduduk. (data dapat dilihat pada table I.1)

Tabel I.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kab. Bengkulu Tengah, 2015

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
(1)	(2)	(3)
1. Talang Empat	14,13	162,65
2. Karang Tinggi	10,89	85,37
3. Taba Penanjung	10,61	77,11
4. Merigi Kelindang	6,15	67,37
5. Pagar Jati	5,60	31,99
6. Merigi Sakti	5,40	58,25
7. Pondok Kelapa	25,64	167,26
8. Pondok Kubang	8,30	97,26
9. Pematang Tiga	6,96	57,90
10. Bang Haji	6,32	96,41
Bengkulu Tengah	100,00	88,07

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016

Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar (>84%) merupakan kawasan kebun campuran yang dikelola oleh rakyat, dengan jenis komoditas antara lain : kelapa sawit, karet, pisang, rambutan, durian, dan berbagai jenis tanaman hortikultura buah-buahan lainnya. Selain kebun campuran pola penggunaan lahan lainnya adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).



Tabel I.2a Luas Masing-masing Jenis Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	KECAMATAN	Hutan Primer		Hutan Sekunder		Semak Belukar		Kebun Campuran		Perkebunan		Rawa	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bang Haji	-	-	-	-	-	-	7.261,02	5,93	2.270,22	1,85	-	-
2	Karang Tinggi	-	-	-	-	39,03	0,03	17.732,94	14,49	959,84	0,78	-	-
3	Merigi Kelindang	-	-	414,29	0,34	-	-	11.541,44	9,43	-	-	-	-
4	Merigi Sakti	669,18	0,55	-	-	-	-	11.551,41	9,44	-	-	-	-
5	Pagar Jati	-	-	-	-	-	-	5.321,40	4,35	34,44	0,03	-	-
6	Pematang Tiga	1.148,84	0,94	-	-	1.388,32	1,13	7.896,59	6,45	1.115,77	0,91	-	-
7	Pondok Kelapa	-	-	-	-	-	-	10.024,52	8,19	1.172,01	0,96	-	-
8	Pondok Kubang	-	-	-	-	71,92	0,06	4.551,88	3,72	-	-	-	-
9	Taba Penanjung	3.014,02	2,46	1.763,29	1,44	-	-	24.396,05	19,93	-	-	-	-
10	Talang Empat	-	-	-	-	482,68	0,39	3.055,85	2,50	258,67	0,21	47,86	0,04
TOTAL		4.832,04	3,95	2.177,58	1,78	1.981,94	1,62	103.333,10	84,43	5.810,95	4,75	47,86	0,04

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2012



Lanjutan ...

Tabel I.2b

No	KECAMATAN	Sawah		Tegalan/Ladang		Tambak/Empang		Tanah Terbuka		Pemukiman		Tubuh Air		TOTAL LUAS	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bang Haji	-	-	-	-	-	-	41,29	0,03	8,68	0,01	19,78	0,02	9.600,99	7,84
2	Karang Tinggi	-	-	104,40	0,09	-	-	-	-	171,56	0,14	120,94	0,10	19.128,72	15,63
3	Merigi Kelindang	-	-	-	-	-	-	-	-	129,37	0,11	-	-	12.085,10	9,87
4	Merigi Sakti	-	-	-	-	-	-	73,77	0,06	217,99	0,18	-	-	12.512,34	10,22
5	Pagar Jati	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	0,01	-	-	5.362,84	4,38
6	Pematang Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	6,93	0,01	-	-	11.556,45	9,44
7	Pondok Kelapa	525,66	0,43	-	-	16,55	0,01	236,99	0,19	958,09	0,78	164,29	0,13	13.098,12	10,70
8	Pondok Kubang	-	-	-	-	-	-	-	-	37,81	0,03	-	-	4.661,61	3,81
9	Taba Penanjung	-	-	243,42	0,20	-	-	-	-	980,05	0,80	76,63	0,06	30.473,47	24,90
10	Talang Empat	-	-	-	-	-	-	-	-	41,83	0,03	27,47	0,02	3.914,36	3,20
TOTAL		525,66	0,43	347,83	0,28	16,55	0,01	352,04	0,29	2.559,33	2,09	409,12	0,33	122.394,00	100,00

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2012



Fungsi kawasan di Kabupaten Bengkulu Tengah didominasi Areal Penggunaan Lain 12.831ha (10,5%), kemudian hutan lindung 18.428ha (15,1%), kawasan suaka alam 5.619, dengan rincian Cagar Alam (CA) 4 ha (0,003%), Taman Hutan Raya (Tahura) 1,162 ha (0,9 %) dan Taman Buru (TB) 4.453 ha (3,6%). Data dapat dilihat pada tabel I.3 dibawah ini :

Tabel I.3 Rencana Pola Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No	Rencana Pola Ruang	Luas	
		(hektar)	(%)
A.	Kawasan Lindung	31.797	22,2
1.	Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya	18.579	-
	a. Hutan Lindung	18.428	15,1
	b. Resapan Air	151	0,1
2.	Perlindungan Setempat	7.599	-
	a. Sempadan Sungai	1.819	1,5
	b. Sempadan Pantai	419	0,3
	c. Ruang Terbuka Hijau	5.361	-
3.	Hutan Suaka Alam	5.619	-
	a. Cagar Alam (CA)	4	0,003
	b. Taman Hutan Raya (Tahura)	1.162	0,9
	c. Taman Buru (TB)	4.453	3,6
B.	Kawasan Budidaya	90.597	63,4
1.	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)	2.927	2,4
2.	Kawasan Hutan Produksi (HP)	357	0,3
3.	Kawasan Peruntukan Pertanian	33.773	-
	a. Peruntukan Tanaman Pangan;	4.097	3,3
	b. Peruntukan Hortikultura	5.663	4,6
	c. Peruntukan Perkebunan	23.013	18,8
	d. Peruntukan Peternakan	1.000	0,8
No	Rencana Pola Ruang	Luas	
		(hektar)	(%)
4.	Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan	409	0,3
5.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	20.930	-
	Pertambangan Batubara	20.930	17,1
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	15.405	-
	a. Permukiman Perdesaan	2.467	2,0
	b. Permukiman Perkotaan	2.938	2,4
	c. Relokasi Lahan Permukiman Penduduk	10.000	8,2



7.	Kawasan Agropolitan	3.965	-
8.	Kawasan Peruntukan Perkantoran, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perdagangan dan Jasa	12.831	10,5
Luas Darat		1.223.94	85,64
Luas Laut		2.052.0	14,36
Luas Total Darat + Laut		1.429.14	100

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, 2012 – 2032

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian, Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat baik sehingga tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Bengkulu.

Di samping potensi dibidang pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi pertambangan yang sangat baik di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu dengan bentangan pantai yang dimiliki sangat memungkinkan untuk pengembangan sumberdaya kelautan yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Jenis tanah di Kabupaten Bengkulu Tengah dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu aluvial, podsolik merah kuning, latosol dan andosol dengan rincian seperti berikut ini :

Tabel I.4 Jenis Tanah dan Luas
Di Kabupaten Bengkulu Tengah

NO	JENIS TANAH	LUAS (Km ²)		
		2013	2014	2015
1	Organosol	5,14	5,14	5,14
2	Aluvial	86,41	86,41	86,41
3	Regosol	368,41	368,41	368,41
4	Podsolik Merah Kuning (PMK)	124,107	124,107	124,107
5	Latosol	69,28	69,28	69,28
6	Asosiasi Latosol dan PMK	-	63,15	63,15
7	Andosol	-	36,72	36,72
8	Asosiasi Latosol dan Andosol	372,81	372,81	309,66



9	Asosiasi Andosol dan Regosol	74,29	74,29	74,29
10	Asosiasi PMK dan Litosol	-	86,78	86,78

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkulu Tengah, 2015

Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 – 541 mdpl dengan bentuk wilayah beragam. Topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 – 35%. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5% terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Sedangkan wilayah lainnya sebagian besar merupakan wilayah yang berbukit. Lokasi titik tertinggi hingga 541 mdpl berada di kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 – 15 mdpl.

Jenis tanah yang dominan dijumpai di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah : Regosol (368,41) dan Asosiasi Latosol dan Andosol (309,66). Sedangkan lainnya adalah kambisol, aluvial, latosol, litosol, organosol, dan regosol. Podsolik, latosol, dan kambisol saat ini telah banyak dikembangkan untuk pertanian perkebunan, yakni kebun campuran dengan komoditas kelapa sawit dan karet. Secara ringkas uraian karakteristik satuan peta tanah pada wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tabel I.5

Tabel I.5 Jenis Tanah Per Kecamatan
Di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Nama Kecamatan	Jenis Tanah			
		Aluvial	PMK	Latosol	Andosol
1	Karang Tinggi	4.899	6.026	2.822	-
2	Talang Empat	6.23	2.759	373	-
3	Pondok Kelapa	388	8.495	122	375
4	Pematang Tiga	768	11.634	493	-
5	Pagar Jati	970	11.885	714	299
6	Taba Penanjung	2.04	12.226	64	-
7	Pondok Kubang	1.298	5.917	1.295	98
8	Bang Haji	1.823	3.344	1.973	-
9	Merigi Kelindang	1.387	5.684	2.749	257
10	Merigi Sakti	1.445	9.566	1.81	166



Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Tahun 2009

Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong beriklim basah. Berdasarkan data hujan dan data iklim dari Stasiun Klimatologi Pulau Baai (1998 - 2009), rata-rata curah hujan tahunan di wilayah ini tergolong tinggi, yakni 3.394 mm (>2000 mm/tahun), dengan jumlah hari hujan rata-rata 118 hari/tahun. Terdapat 10 bulan basah (>200 mm), dengan curah hujan bulanan maksimum jatuh pada bulan Desember (499 mm/bulan), dan sepanjang tahun tidak dijumpai bulan kering (<100 mm/bulan). Curah hujan bulanan minimum jatuh pada bulan Juli (176 mm/bulan). Rata-rata data iklim wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah disajikan pada tabel I.6

Tabel I.6 Rata-rata Suhu Menurut Bulan
Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara			Kelemb. Udara (%)	Kec. Angin (km/jam)	Arah. Angin
			Min (°C)	Rata-rata (°C)	Maks (°C)			
Januari	207	13	30,2	23,3	26,3	85	3,6	W
Pebruari	232	12	31,5	29,5	26,5	84	2,8	W
Maret	164	6	31,5	24,0	31,04	81	2,6	W
April	508	15	23,85	26,84	31,31	85	2,3	W
Mei	150	7	23,88	27,01	31,53	83	2,0	W
Juni	21	3	23,39	26,55	31,25	82	2,2	W
Juli	114	10	23,06	26,22	30,89	80	2,6	W
Agustus	109	7	23,36	25,97	30,79	82	3,5	S
September	65	2	23,25	26,08	30,76	83	3,6	SE
Oktober	206	15	23,52	26,17	30,56	83	3,1	W
Nopember	717	22	23,53	26,22	30,48	86	3,2	W
Desember	345	15	23,50	26,03	30,10	86	2,9	W
Rata-rata	236.5	127	23,53	26,39	30,87	85	2,9	W

Sumber : BMKG Klas 1 Pulau Baai (2016)

Suhu udara rata-rata daerah adalah 26,39°C, sedang suhu minimum rata – rata 23,53°C; dan maksimum 30,87°C. Kelembapan udara relatif rata - rata 85%. Kelembapan udara terendah terjadi pada bulan Agustus (83,5%), sedangkan kelembapan udara tertinggi dijumpai pada bulan Desember (87,4%). Berdasarkan Klasifikasi Agroklimat Oldeman (1975) dalam Handoko (1995), tipe iklim di Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong tipe iklim A1, yakni daerah dengan bulan basah >9 bulan dan bulan kering <2 bulan. Menurut



klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) dalam Handoko (1995), iklim di kawasan ini termasuk tipe iklim A (daerah sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropika), dengan perbandingan bulan kering (<60 mm/bulan) dan bulan basah (>100 mm/bulan) (Q) = 0,00%.

2. ASPEK DEMOGRAFI



Gambar I.4 Bupati Bengkulu Tengah Dr.Ferry Ramli, SH, MH
meninjau Lahan Pembangunan Perkantoran di Kabupaten Bengkulu Tengah

Jumlah penduduk kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan data 2014 adalah sebanyak 106.017 jiwa dengan Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 1.429,14 Km² terdiri atas luas daratan 1.223,94 Km² dan wilayah laut dengan luas 205,2 Km² yang terdiri dari atas 10 kecamatan yang meliputi Pematang Tiga, Merigi Sakti, Pondok Kubang, Pondok Kelapa, Bang Haji, Merigi Kelindang, Talang Empat, Taba Penanjung, Karang Tinggi dan Pagar Jati. Berdasarkan kepadatan penduduk perkecamatan menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki penyebaran penduduk yang belum merata. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan tingkat kepadatan diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan yang mempunyai kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pondok Kelapa sebesar 164.55



jiwa/ha, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah pada Kecamatan Pagar Jati yakni sebesar 31.68 jiwa/Km².

Kecamatan yang memiliki kepadatan yang lebih tinggi umumnya memiliki kelengkapan fasilitas sosial-ekonomi yang lebih lengkap dan tingkat perkembangan yang cukup tinggi terhadap kegiatan yang ada, hal ini berlaku pada kecamatan Talang Empat. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan rendah memiliki kegiatan-kegiatan yang perkembangannya relatif rendah, kondisi demikian terlihat pada Kecamatan Pagar Jati, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.7 di bawah ini :

Tabel I.7 Jumlah Kepadatan Penduduk
Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Talang Empat	93,62	14.779	157.86
2	Karang Tinggi	137,47	11.655	84.78
3	Taba Penanjung	148,38	11.336	76.40
4	Pagar Jati	188,57	5.973	31.68
5	Pondok Kelapa	165,20	27.183	164.55
6	Pematang Tiga	129,64	7.349	56.69
7	Merigi Kelindang	98,42	6.566	66.71
8	Merigi Sakti	99,93	5.789	57.93
9	Bang Haji	70,71	6.644	93.96
10	Pondok Kubang	92	8.743	95.03
Jumlah		1.223,94	106,017	886

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2014

3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama DPRD telah mensyahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 02 Desember 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2016 yang perubahannya dapat digambarkan sebagai berikut:



No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Inspektorat Daerah	1
4.	Dinas	20
5.	Badan	5
6.	Kecamatan	10
Jumlah		38

Sumber : Perda Kab. Bengkulu Tengah Nomor 13 tahun 2016

Sistem pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan Tugas pemerintahan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di wilayah Kabupaten.

Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip dasar yang terkandung dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

C. Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Oleh karena itu, pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan out put, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai pemilik faktor produksi.

Laju pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 yang turun sebesar 10,02 persen. Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Agar sektor pertanian dapat menjadi kekuatan perekonomian, perlu dilakukan revitalisasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta untuk mengurangi kemiskinan. Revitalisasi pertanian dapat dilakukan antara lain melalui reformasi agraria sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang.



Potensi ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat dari struktur perekonomiannya berdasarkan harga berlaku selama tahun 2014 didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 30.37 persen. Walaupun sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sektor tersebut belum mampu menunjukkan hasil nyata terutama bila ditinjau dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai asetnya yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan.



Gambar I.5. Ragam Kehidupan Masyarakat di Bengkulu Tengah

Ada beberapa hal yang menjadi dasar mengapa sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu lebih dari 50% tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian dapat digunakan untuk mendukung perkembangan sektor industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agroindustri. Ketiga, ekspor andalan komoditas pertanian seperti sawit, karet, kopi



merupakan sumber devisa yang diperlukan oleh bangsa. Keempat, keberhasilan sektor pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung dari sumber pendanaan luar.

Sektor pertambangan dan penggalan memiliki kontribusi sebesar 24,03 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalan memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi jika melihat potensi yang ada, sektor pertambangan dan penggalan masih mungkin untuk terus dikembangkan. Khusus pertambangan batu bara di Bengkulu Tengah, dua tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan batu bara untuk kepentingan industri, serta didukung peningkatan harga batu bara.

Peran industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bengkulu Tengah pada tahun 2012 sebesar 4,85 persen. Angka tersebut sebagian besar disumbangkan oleh industri pengolahan hasil perkebunan, seperti sawit, karet, kopi dan rotan, serta didukung oleh industri kecil dan rumah tangga lainnya. Untuk membangun sektor industri, semua potensi sumber daya alam perlu dimanfaatkan dan diolah menjadi produk industri secara optimal. Beberapa prioritas industri yang perlu dipertimbangkan diantaranya industri yang berbasis sumber daya alam dan industri yang berbasis manufaktur dan padat karya.

Sektor konstruksi tumbuh cepat seiring dengan perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek. Pembangunan gedung perkantoran yang sekarang ini tampak di pusat kota Bengkulu Tengah. Peranan pembangunan yang semakin pesat dirasakan namun distribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah masih kecil yaitu dibawah 5 %. Distribusi sektor ini pada tahun 2012 sebesar 3.87 %. Secara konvensional, sektor konstruksi dikategorikan kedalam sektor utilitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa keberadaan sektor konstruksi adalah untuk membantu perkembangan sektor ekonomi lainnya untuk memasuki tahap kemajuan. Dengan demikian sektor konstruksi hadir mengikuti perkembangan dan perluasan skala ekonomi sektor riil. Sektor konstruksi masih tetap atraktif dan prospektif karena faktor-faktor : jumlah penduduk yang terus meningkat, tanah yang tersedia masih luas, perekonomian yang terus tumbuh, permintaan masyarakat yang apresiatif.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan cukup besar dalam memacu perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2012 perannya sebesar 12,45 persen. Sektor perdagangan ini merupakan sektor sekunder, yang bermakna bahwa



sektor yang melanjutkan kegiatan dari sektor-sektor primer seperti sektor pertanian, sektor industri dan pertambangan. Bila ketiga sektor ini banyak memproduksi produknya maka sektor perdagangan juga akan semakin meningkat produk-produk yang akan dijualnya. Dari ketiga subsektor tersebut, subsektor perdagangan sumbangannya terhadap perekonomian pada tahun 2012 sebesar 12,31 persen, subsektor hotel 0,03 persen dan subsektor restoran 0,11 persen.

Peran sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2012 terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 4,26 persen, subsektor pengangkutan 3,84 persen dan komunikasi 0,42 persen. Subsektor pengangkutan sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah, Berperanan penting dalam meningkatkan mobilitas penduduk maupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada tahap awal pembangunan suatu wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas lainnya termasuk sarana dan prasana pengangkutan selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Pembangunan sub sektor pengangkutan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya sejauh jasa yang dihasilkannya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Diantara berbagai jenis angkutan, angkutan jalan raya merupakan alat yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tahap awal pembangunan. Meskipun demikian, bagi wilayah yang sudah melampaui tahap awal pembangunan, penggunaan jalan raya untuk kebutuhan angkutan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Pengangkutan jalan raya merupakan moda transportasi yang paling mudah ditemukan serta digunakan dalam berbagai kepentingan. Peran subsektor angkutan jalan raya terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3,83 persen tahun 2012.

Langkah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menuju perbaikan diharapkan kian membenteng. Hal ini dikarenakan sektor ini dapat menjadi indikator bagi kemajuan dari sektor-sektor lainnya. Peranan sektor ini tahun 2014 mencapai 4,68 persen.

Sektor jasa-jasa mencakup sektor jasa pemerintahan umum dan swasta. Jasa pemerintahan umum mencakup seperti belanja pemerintah yang termasuk proyek pembangunan dan gaji pegawai, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sebagainya. Sektor jasa swasta meliputi kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perumahan dan rumah tangga. Selama tahun 2012, peran sektor jasa didalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 10,93 persen.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

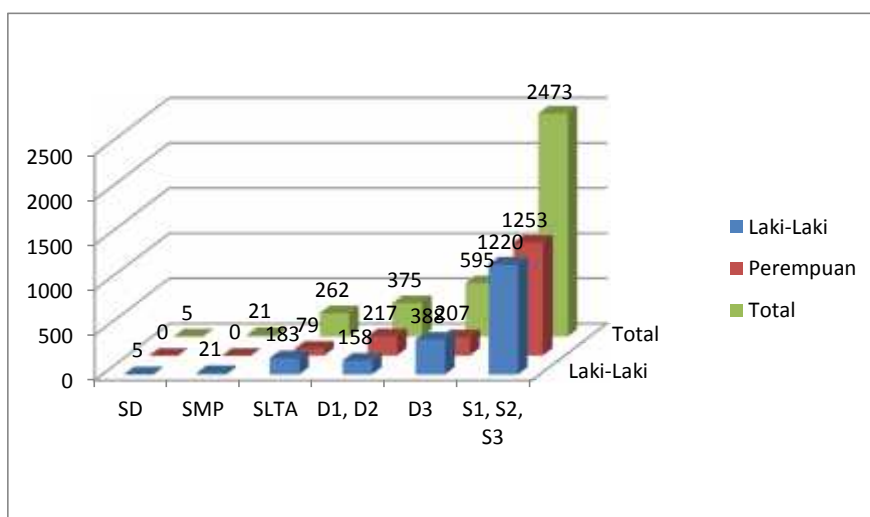


Bengkulu Tengah pada tahun 2012 secara keseluruhan mencapai 6,74 persen. Terdapat tiga sektor unggulan yang menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan hotel dan restoran.

D. Keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup beragam. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Bengkulu Tengah sebanyak 3.731 orang, terdiri dari 1.839 orang atau 49.29% Laki-laki dan 1.892 orang atau 50,71% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Kabupaten Bengkulu Tengah didominasi oleh jenjang pendidikan D.4/S1, S2 dan S.3 sebanyak 66.28% atau 2.473 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 15.94% atau 595 orang, jenjang pendidikan Di dan D2 sebanyak 10.05% atau 375 orang, jenjang SLTA sebanyak 7.02% atau 262 orang, jenjang SLTP sebanyak 0.5% atau 21 orang dan yang terakhir Jenjang SD sebanyak 0.1% atau hanya 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bengkulu Tengah sangat baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar I.6 berikut :



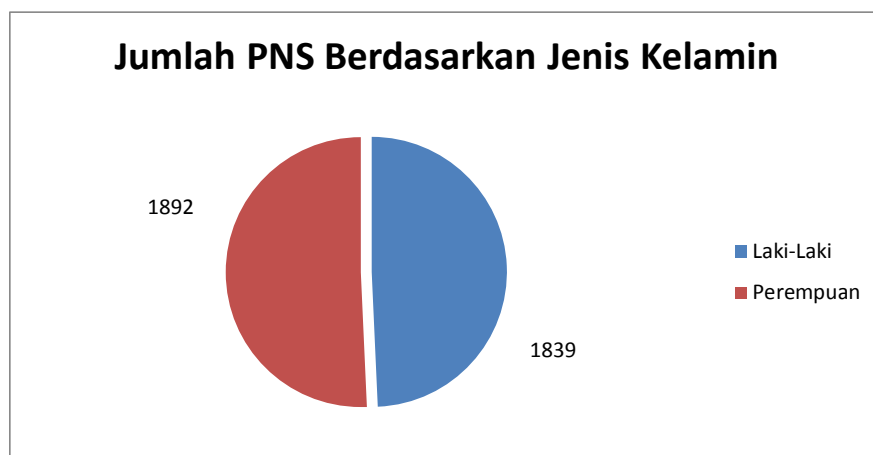
Sumber :

Bengkulu Dalam Angka 2016

Gambar I.6 PNS Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



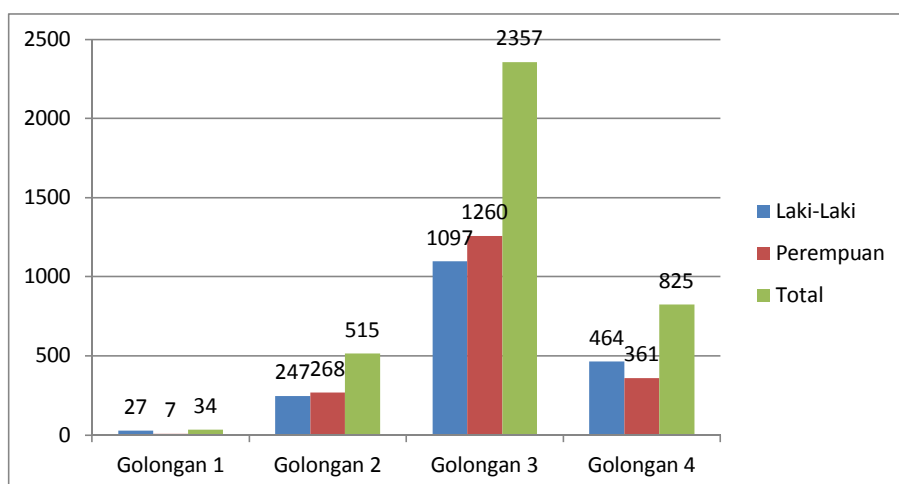
Bila datanya dipilah menurut Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenis kelamin, perimbangan gender nya relatif berimbang yang mana PNS berjenis laki-laki berjumlah 1.892 PNS atau 50.71% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.839 atau 49.29%.



Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016

Gambar : I.6 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut pangkat, datanya menunjukkan bahwa perbandingan pangkat antara laki-laki dan perempuan cukup berimbang, baik golongan I, II, III dan golongan IV. Hal ini menunjukkan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pengembangan karir karena pangkat merupakan syarat utama seseorang menduduki suatu jabatan. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat jenjang pangkat perempuan dan laki-laki semakin terbuka. termasuk kemudahan-kemudahan dalam hal pengurusan kenaikan pangkat , seperti berkas kenaikan pangkat, ketepatan waktu penyampaian berkas ke Badan Kepagawaian maupun ke BKN Regional VIII Palembang dan ke BKN Pusat di Jakarta. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar I.7 di bawah ini.



Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016

Gambar : I.7 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

E. Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten pemekaran baru tentunya masih memiliki banyak kekurangan dari sebagai aspek, baik dari segi ekonomi dan Sosial maupun infrastruktur. Berikut merupakan permasalahan yang terdapat di kabupaten Bengkulu Tengah :

1. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua faktor yang paling dominan didalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala kualitas pendidikan dan kesehatan bagus, kualitas SDM akan sekaligus bagus. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi bagian penting dari MDGs sebagai mana diprogramkan oleh PBB. Sehingga, negara-negara lain juga menaruh perhatian yang serius terhadap dua isu ini. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih berada di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Bengkulu. Pada 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 63,35. Pada waktu yang sama, IPM Propinsi Bengkulu sudah 72,50. Pada 2010, realitasnya tidak jauh berbeda. IPM di Kabupaten Bengkulu Tengah memang meningkat menjadi 68,24, tetapi IPM di Propinsi Bengkulu sudah mencapai 73,06.



Sumber daya manusia merupakan faktor utama dari pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lebih baik, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga lebih baik, biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Pada akhirnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Sebagai contoh Jepang dan sejumlah negara lainnya, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Hanya saja Jepang memiliki SDM yang berkualitas, mereka mampu menjadi negara yang maju. Karena memiliki kualitas SDM yang bagus, banyak negara maju telah menjadi negara yang jauh lebih kompetitif (*competitive state*) kalau dibandingkan negara-negara lain. Di Asia, diantara negara yang kompetitif adalah Jepang dan Singapura. Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya, angka buta huruf, masih lebih tinggi dari pada angka buta huruf di Provinsi Bengkulu.

Pada 2009 angka buta huruf di Provinsi Bengkulu sebesar 4,22, sementara di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3,44. Angka Partisipasi kasar juga demikian, masih lebih rendah dari rata-rata angka partisipasi Kasar di Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan kepada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar. Upaya demikian akan mungkin terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan berbagai penjuru wilayah

Selain itu, juga diharapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bengkulu Tengah masih dibawah rata-rata Provinsi Bengkulu. Pada 2009, UHH di Kabupaten Bengkulu Tengah 65,60, sementara di Provinsi Bengkulu rata-rata sudah mencapai 70,7. Pada 2010, UHH di Kabupaten



Bengkulu Tengah meningkat menjadi 71,3. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya pola pangan harapan yaitu pola kecukupan Asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Di samping, angka kematian bayi dan ibu-ibu yang melahirkan masih cukup tinggi. Keadaan demikian menjadi tantangan didalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Permasalahan mendasar dalam pengembangan kesehatan, antara lain: (1) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasi dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (2) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (3) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian ibu (AKI) melahirkan masih relative tinggi; (4) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.

1. Pengangguran dan Kemiskinan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang tenaga kerja adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acapkali terkait satu sama lain. Pengangguran merupakan salah satu pemicu bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah, jumlah penduduk yang terkatagori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Pada



2010, penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 52,4% atau 54.606 jiwa. Rinciannya penduduk miskin tersebut di ambil berdasarkan jumlah penerima jamkesmas sebesar 49.406 jiwa dan jaskesda 5.200 jiwa. Sedangkan pada tahun 2011 penduduk miskin mencapai 53,75% atau 56.006 jiwa.

Tabel I.8 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kab. Bengkulu Tengah 2016

Tingkat Pendidikan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
1	2	3	4
1. Tidak /Belum Tamat SD	-	-	-
2. Sekolah Dasar	-	-	-
3. SMTP	132	230	362
a. Umum			
b. Kejuruan			
4. SMTA Setingkat lainnya	1547	37	1584
5. Diploma I/II/III	-	-	-
6. Sarjana	331	117	448
JUMLAH	2010	384	2394

Sumber : Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016

Tabel I.9 Upah Minimum Regional per Bulan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2010-2015

Tahun	Upah Minimum Regional (Rupiah)
(1)	(2)
2010	780 000
2011	815 000
2012	930 000
2013	1 200 000
2014	1 350 000
2015	1 500 000

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah



2. Revitalisasi Sektor Pertanian dan Parawisata



Gambar I.8 Kegiatan Panen Raya di Kabupaten Bengkulu Tengah

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam tiga tahun terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB mencapai 40,3%. Disamping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena sektor industri olahan, tidak cukup berkembang. Sementara itu, sektor jasa yang berkembang lebih cepat, secara tradisional memang dikenal sebagai sektor tidak banyak menyerap angkatan kerja. Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Para petani, menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Para nelayan, menghadapi masalah dengan penurunan tangkapan ikan. Di pihak lain, para petani dan nelayan tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Tantangan terbesar bagi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah melakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini, produksi sektor pertanian akan meningkat, sehingga sumbangannya pada PDRB juga akan meningkat. Selain itu, revitalisasi juga berkaitan dengan upaya mengkaitkan (*linkage*) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani



dan nelayan. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani dan nelayan juga akan mengalami peningkatan.

Kendala dalam pengembangan pertanian mencakup, antara lain: (1) pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran; (2) pengembangan pertanian masih bersifat parsial dapat sistem pertanian; (3) ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global; (4) ketersediaan input produksi pertanian relatif terbatas; (5) kondisi infrastruktur jalan kesentra produksi belum memadai; (6) tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, serta tata niaga bahan pangan belum terkendali dengan baik.

Tabel I.10 Dimensi Jaringan Irigasi
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009

Panjang Saluran	Panjang Saluran		Luas Cakupan	
	Primer (m)	Sekunder (m)	Potensial (Ha)	Fungsional (Ha)
107.145	7.698	99.447	6.501,5	3.387

Sumber; RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah

Sementara itu, sektor jasa yang memiliki potensi bagi peningkatan sambungan terhadap PDRB adalah sektor pariwisata yang terkait dengan industri pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan industri kerajinan. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi wisata alam yang cukup besar. Potensi ini lebih besar lagi kalau dikaitkan dengan posisi Provinsi Bengkulu, sebagai daerah pintu masuk lintas barat melalui perjalanan, manakala potensi wisata itu bisa dikembangkan secara baik, industri kaitan lainnya juga akan berkembang secara baik pula.

3. Infrastruktur

Diantara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong masih belum memadai bagi berbagai kegiatan didalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Tingkat kerusakan jalan, mencapai 50%. Kondisi demikian jelas tidak kondusif bagi upaya upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius



manakala terdapat dana yang memadai. Di Kabupaten Bengkulu Tengah anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Di antaranya adalah mengutamakan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota. dan infrastruktur- infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan saluran irigasi.

Infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum memadai yang ditunjukkan, sebagai berikut: transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan system hirarki terminal sebagai tempat pertukaran modal transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di Kabupaten Bengkulu Tengah belum terakomodasikan dengan optimal;

Tabel I.11 Proporsi Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009

Jenis Permukaan			
Aspal		Non Aspal	
Hotmix	Penetrasi	Krikil / Base	Tanah
23%	44%	23%	10%

Sumber: RTRW kabupaten Bengkulu Tengah

Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Potensi sumber daya air di Kabupaten Bengkulu Tengah yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan system informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai; (3) bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (4) kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih banyak.

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai; dan (5) Penyediaan sumber-sumber energy alternatif seperti pembangkit listrik tenaga (PLN) mikro hidro,surya, dan angin belum ada.



Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum biasa menjangkau setiap pelosok wilayah khususnya untuk layanan jasa telepon kabel untuk daerah Kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama di wilayah perdesaan.

4. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Di antara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di Kabupaten Bengkulu Tengah masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misal, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan. Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.

Karena itu, tantangan besar bagi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

5. Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna / asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yang disebabkan karena kurangnya representasi orang miskin dan terbatasnya ruang publik.



6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakalah terdapat tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, resposifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi.



Gambar 1.9 Bapak Sekda pada kesempatan
Penerimaan Penghargaan National Procurement Award 2016 oleh LKPP-RI

Adaanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Perwujudannya berarti adanya tantangan yang akan menunjang upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih baik di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 dilakukan atas dasar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang merangkum usulan dari berbagai stakeholder, yang dipadukan dengan rancangan RPJMD Kabupaten

*Bab II Perencanaan Kinerja
Berisi :*

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja (PK)
Tahun 2016
- C. Program untuk Pencapaian
Sasaran

Bengkulu Tengah tahun 2012-2017, tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program unggulan SKPD yang memiliki hubungan paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, program prioritas pembangunan daerah ini kemudian menjadi program unggulan kepala daerah yang dilaksanakan untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Dalam menentukan program prioritas daerah ini, beberapa hal perlu menjadi perhatian, antara lain :

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang merupakan tahun terakhir bagi pelaksanaan MDGs.
- b) Hubungannya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Kaitannya terhadap pengembangan sector/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan target pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2012-2017. Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 dilakukan atas dasar kajian terhadap perkembangan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan



lainnya seperti rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, RKPD Provinsi Bengkulu, RTRW Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu, RKP Nasional, dan RPJM Nasional.

Sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih, dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu 5 tahun (2012-2017) akan datang yaitu membawa Kabupaten Bengkulu Tengah keluar dari ketertinggalan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yaitu pengentasan daerah tertinggal, minimal 50 kabupaten hingga 2014.

1. Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, Visi merupakan kesimpulan atau *starting point* dalam menyusun pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah di tetapkan visi daerah yaitu :

“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Pemerintahan Bengkulu Tengah yang Baik dan Bersih** yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari meningkatnya nilai Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun, opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta layanan publik yang prima.
- b. **Bengkulu Tengah Yang Maju** bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara Individual atau Kelompok, serta menggunakan akal sehat dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang majemuk serta bijaksana menghargai adat.



Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan, keterampilan dan keahlian yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan masyarakat/daerah lainnya. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- c. **Bengkulu Tengah Yang Sejahtera** adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang sehat, layak dan manusiawi. Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan perkapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **mis**i dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012- 2017 adalah :

- MISI 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima
- MISI 2 Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara terpadu
- MISI 3 Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya daerah (khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan) dan pemberdayaan rumah tangga sebagai upaya menggerakkan peningkatan kesejahteraan keluarga
- MISI 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan
- MISI 5 Mendorong berkembangnya masyarakat religius dan Berbudaya serta memiliki karakter inovatif dan kompetitif
- MISI 6 Menumbuh kembangkan peran serta aktif masyarakat dan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan dalam pembangunan
- MISI 7 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang serasi



2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan diarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai.

Pelaksanaan dari misi ditujukan pada pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017 ini akan ditekankan pada 4 (empat) urusan pemerintahan yaitu: (1) Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan bencana; (3) Kehutanan; dan (4) Penataan ruang.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan 7 (tujuh) misi, 9 (sembilan) tujuan dan 26 (dua puluh enam) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017, maka disusunlah 29 (dua puluh sembilan) strategi dan 84 (delapan puluh empat) arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut : a) Misi I sebanyak 3 strategi dan 7 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 4 strategi dan 8 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 6 strategi dan 21 arah kebijakan; d) Misi IV sebanyak 7 strategi dan 25 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 4 strategi dan 9 arah kebijakan; f) Misi VI sebanyak 2 strategi dan 5 arah kebijakan; serta g) Misi VII sebanyak 3 strategi dan 9 arah kebijakan.



Misi : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima

Strategi untuk mewujudkan Misi I dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kelembagaan dan tata pelaksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
- b) Terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau
- c) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi I dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- b) Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- c) Meningkatkan pelayanan kedinasan dan kerjasama
- d) Terpenuhinya penyediaan data/informasi/statistik daerah yang cepat, akurat dan *up to date*
- e) Meningkatkan manajemen administrasi kearsipan yang berkualitas
- f) Terselenggaranya pelayanan publik dan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau
- g) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Misi : 2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara terpadu

Strategi untuk mewujudkan Misi 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum serta pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun
- b) Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertambangan dan kelistrikan
- c) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan air bersih
- d) Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase
- b) Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah
- c) Mengembangkan perumahan rakyat yang murah dan berkualitas
- d) Meningkatkan pengawasan di bidang pertambangan



- e) Meningkatkan pengawasan di bidang kelistrikan
- f) Memperbanyak jaringan irigasi dan mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada
- g) Mengembangkan prasarana air bersih, air baku dan limbah
- h) Memperbanyak sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan manajemen pengelolaan persampahan dan pertamanan
- i) Meningkatkan pengembangan dan kerjasama komunikasi, informasi dan media massa

Misi : 3. Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya daerah (khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan) dan pemberdayaan rumah tangga sebagai upaya menggerakkan peningkatan kesejahteraan keluarga

Strategi untuk mewujudkan Misi 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan
- b) Meningkatkan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi
- c) Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak dan industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
- e) Optimalisasi pengelolaan investasi
- f) Mengembangkan pusat-pusat ekonomi dan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesejahteraan petani
- b) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
- c) Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan peternakan serta kelautan dan perikanan
- d) Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan



- e) Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan
- f) Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan serta kelautan dan perikanan
- g) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- h) Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi
- i) Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi
- j) Menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan koperasi
- k) Mengembangkan industri berbasis sumber daya (*resource-based industries*) terutama pertanian, perkebunan dan perikanan
- l) Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat
- m) Meningkatkan ketersediaan data dan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi
- n) Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam
- o) Mengembangkan pusat-pusat industri pariwisata yang terintegrasi dan terpadu antar sektor serta antar wilayah
- p) Meningkatkan perlindungan hutan dan pengelolaan hasil hutan
- q) Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal dan nasional
- r) Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
- s) Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga
- t) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa
- u) Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
- v) Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja

Misi : 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan

Strategi untuk mewujudkan Misi 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar pendidikan nasional



- b) Penataan sistem pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik
- c) Perluasan dan pemerataan akses kesehatan
- d) Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan
- e) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia
- f) Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan social
- g) Peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan perlindungan anak

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 4 dapat dijelaskan sebagai berikut

:

- a) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
- b) Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan.
- c) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat)
- d) Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi *learning society*
- e) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
- f) Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu.
- g) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata
- i) Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat
- j) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
- k) Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
- l) Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita
- m) Meningkatkan pengembangan pola hidup dan lingkungan yang sehat
- n) Meningkatkan standarisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan
- o) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan



- p) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
- q) Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat
- r) Meningkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan prestasi olahraga
- s) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan
- t) Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah
- u) Meningkatkan kualitas kebijakan, manajemen dan kelembagaan pelayanan sosial
- v) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin
- w) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- x) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- y) Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB

Misi : 5. Mendorong berkembangnya masyarakat religius dan berbudaya serta memiliki karakter inovatif dan kompetitif

Strategi untuk mewujudkan Misi 5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah
- b) Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama serta mengembangkan upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
- c) Optimalisasi peran sumber daya manusia, kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- d) Menegakkan supremasi hukum, politik dan keamanan

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b) Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur
- c) Revitalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama
- d) Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.
- e) Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- f) Meningkatkan penegakan supremasi hukum
- g) Optimalisasi penyusunan produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan
- h) Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
- i) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

Misi : 6. Menumbuhkembangkan peran serta aktif masyarakat dan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan dalam pembangunan

Strategi untuk mewujudkan Misi 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
- b) Peningkatan kualitas kehidupan, perlindungan dan peran perempuan dalam pembangunan

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.



- d) Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- e) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Misi : 7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang serasi

Strategi untuk mewujudkan Misi 7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan yang baik serta optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya
- b) Meningkatkan penanggulangan bencana dan pengelolaan kawasan rawan bencana
- c) Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan dan penanggulangan lahan kritis
- b) Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.
- c) Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dalam tata ruang sesuai dengan peran dan fungsinya
- d) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya
- e) Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik
- f) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana
- g) Menyusun perencanaan tata ruang wilayah yang visioner, adaptif dan berkelanjutan
- h) Optimalisasi pengembangan wilayah sesuai dengan pemanfaatan ruang



i) Meningkatkan kualitas pengendalian ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-130 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 800-298 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan SKPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah disajikan sebagai berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama
1.	Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 2. Jumlah Perda yang dikeluarkan 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan 2. Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan tugas belajar 3. Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi panjang jalan kondisi baik 2. Panjang jalan yang terbangun 3. Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi 4. Jumlah gedung/kantor yang dibangun
4.	Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah 2. Opini Pemeriksaan BPK
5.	Terpenuhnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam 2. Jumlah SKPD yang memiliki jaringan Web



6.	Meningkatnya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar 2. Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar 3. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar 4. Rasio guru/murid 5. Angka melek huruf
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 2. Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3. Persentase penanganan balita gizi buruk
8..	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga 2. Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten
9.	Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenaga kerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 2. Persentase peserta KB aktif 3. Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan
10.	Meningkatnya ketersediaan air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 2. Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih
11.	Meningkatnya usaha pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam 2. Rata-rata peningkatan produksi padi
12.	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi 2. Persentase koperasi aktif 3. Jumlah UMKM
13.	Meningkatnya investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan menengah dan besar 2. Jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan

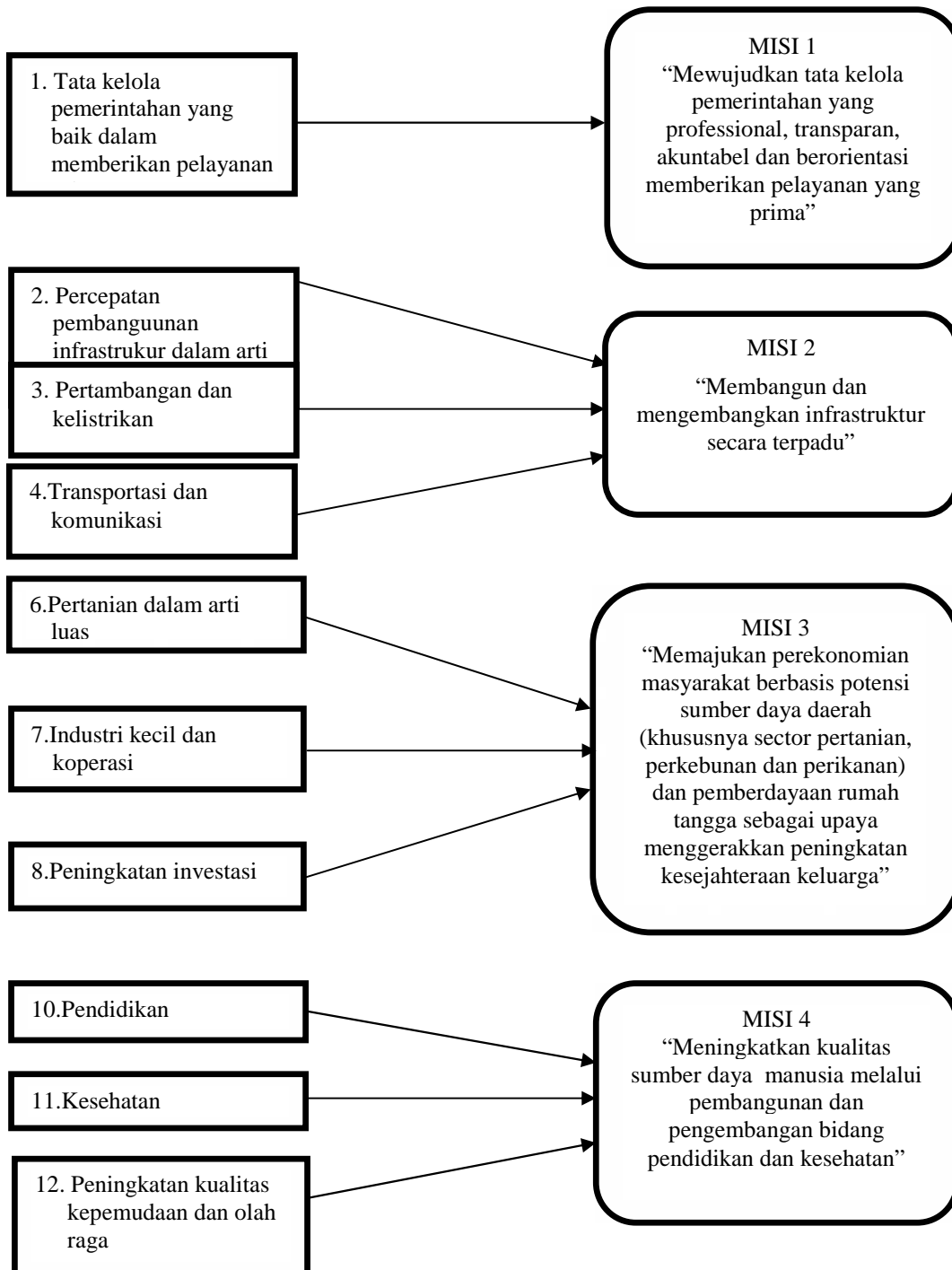
3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

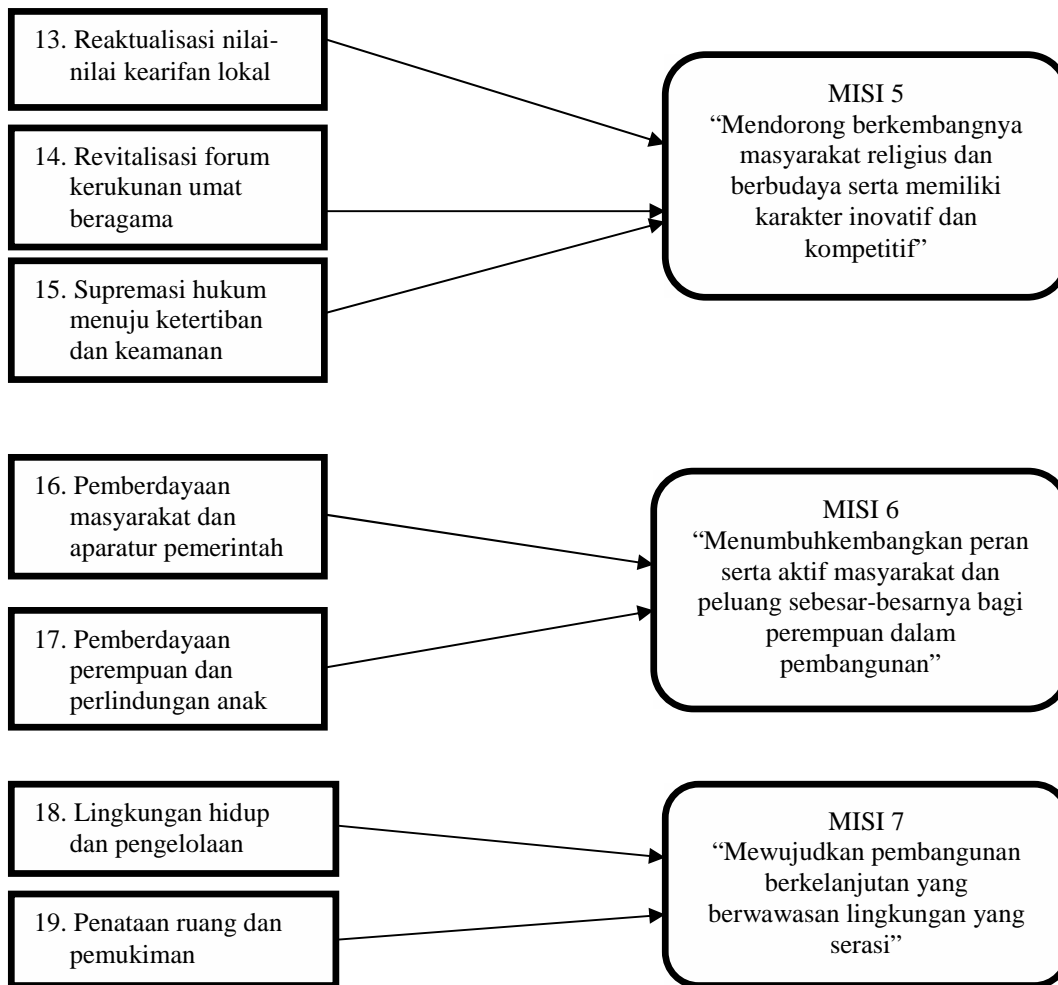
Tema pembangunan dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

2013	2014	2015	2016	2017
Menguatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur yang baik dan bersih menuju masyarakat maju dan sejahterah	Mengembangkan Kualitas aparatur pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur yang baik dan bersih menuju masyarakat maju dan sejahterah.	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur yang baik dan bersih menuju masyarakat maju dan sejahterah.	Memantapkan kualitas SDM, mendayagunakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju masyarakat maju dan sejahterah.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menuju masyarakat maju dan sejahterah.



Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi 19 program, sebagai berikut :





Gambar II.1 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2012-2017, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016. RKPD tahun 2016 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun anggaran 2016 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.



B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016

Berdasarkan dokumen RPJMD periode 2012-2017 telah ditetapkan sasaran-sasaran yang akan di capai dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah pada masa yang akan datang.

Peyusunan RPJMD merupakan tahap awal pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah No 10 tahun 2013. Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah dan sistematis dengan harapan dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 11 tahun 2015 Yang merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun untuk melaksanakan Misi dan mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2016.

Perumusan Skala Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 telah tercantum dalam RPJMD dan dijabarkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 11 tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016. Skala Prioritas pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2016 disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah dan target yang ditetapkan dalam RPJMD, dari 13 sasaran strategis yang menjadi Skala prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun 2016, ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016. Penetapan kinerja tersebut ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah pada Februari 2016, sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	100



		dan eksternal		
		2. Jumlah Perda yang dikeluarkan	Perda	10
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	CC
		4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	Sedang
2.	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	1. Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan	Persen	10
		2. Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar	Orang	10
		3. Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan	Dokumen	62
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur	1. Proporsi panjang jalan kondisi baik	Km	324,33
		2. Panjang jalan yang terbangun	Km	230.00
		3. Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Meter	3.000
		4. Jumlah gedung/kantor yang dibangun	Unit	8
4.	Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah	Rupiah	9.971.443.429,
		2. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP
5.	Terpenuhnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	1. Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam	Stationer	40
		2. Jumlah SKPD yang memiliki jaringan Web	Web	28
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar	Persen	100
		2. Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar	Tahun	9
		3. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	Persen	100
		4. Rasio guru/murid	Persen	100
		5. Angka melek huruf	Persen	86,68
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	Persen	87
		2. Persentase ibu	Persen	92



		bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		
		3. Persentase penanganan balita gizi buruk	Persen	100
8.	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	1. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	Organisasi	210
		2. Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten	Kegiatan	130
9.	Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenaga kerjaan	1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	100
		2. Persentase peserta KB aktif	Persen	100
		3. Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja sektor perkebunan	Persen	97
10.	Meningkatnya ketersediaan air bersih	1. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	Rumah Tangga	100
		2. Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih	Desa/Kelurahan	36
11.	Meningkatnya usaha pertanian	1. Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam	Ton	4,5
		2. Rata-rata peningkatan produksi padi	Ton	3.6
12.	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM	1. Jumlah koperasi	Unit	200
		2. Persentase koperasi aktif	Persen	90
		3. Jumlah UMKM	UMKM	2000
13.	Meningkatnya investasi	1. Jumlah perusahaan menengah dan besar	Perusahaan	50
		2. Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan	Dokumen	1200

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut :



Tabel II.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1	Terselenggaranya Tata pemerintahan yang Baik	38
2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	2
3	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur	3
4	Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	37
5	Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	5
6	Meningkatnya Mutu Pendidikan	3
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	17
8	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	6
9	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Ketenagakerjaan	3
10	Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih	1
11	Meningkatnya Usaha Pertanian	4
12	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	5
13	Meningkatnya Investasi	2



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil

maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel III.1 berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	90,1	Sangat Baik	
2	75,1 90	Tinggi	



3	65,1 75	Sedang	
4	50,1 65	Rendah	
5	50	Sangat Rendah	

A. Capaian Indikator Utama 2016

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 - 2017 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-130 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 800-298 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	2016		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	100	99.40	99,40
2	Jumlah Perda yang dikeluarkan	10	10	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	CC	100
4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sedang	Sedang	100
5	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan	10	10	100
6	Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar	10	10	100
7	Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan	62	62	100
8	Proporsi panjang jalan kondisi baik	324,33	252.50	61,04
9	Panjang jalan yang terbangun	230.00	138.25	60,11
10	Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi	3.000	2.105	70,17
11	Jumlah gedung/kantor yang dibangun	8	6	75
12	Jumlah penerimaan PAD dari sektor	9.971.443.429	9.228.942.859	92,55



	pajak dan retribusi daerah			
13	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
14	Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam	40	37	92.50
15	Tersedianya jaringan internet dan Web di beberapa SKPD	28	9	32.14
16	Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar	100	96,5	96,5
17	Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar	9	9	100
18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	100	85.5	85,5
19	Rasio guru/murid	100	100	100
20	Angka melek huruf	86,68	86,68	100
21	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87	87	100
22	Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	92	78.72	78,72
23	Persentase penanganan balita gizi buruk	100	100	100
24	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	210	210	100
25	Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten	130	130	100
26	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	100	65.30	65.30
27	Persentase peserta KB aktif	100	142.78	142,78
28	Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja	97%	88.66	91.40
29	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	100	3.799	63.31
30	Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih	36	31	86,11
31	Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam	4,5 ton	4,0 ton	88.88
32	Rata-rata peningkatan produksi padi	36.021 ton	30.768 ton	85.4
33	Jumlah koperasi	200	186	93.00
34	Persentase koperasi aktif	90	80	88
35	Jumlah UMKM	2.000	1.213	60
36	Jumlah perusahaan menengah dan besar	50	32	64
37	Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan	1200	1.179	98



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 37 Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016, disimpulkan bahwa 22 (dua puluh dua) IKU atau sebanyak 59.45 % dalam kriteria **Sangat Baik**, bahkan 1 (satu) IKU diantaranya yaitu Persentase Peserta KB aktif realisasinya mencapai angka 142.78%. 6 (enam) IKU atau 16.21% masuk dalam kriteria **Tinggi**, 3 (Tiga) IKU atau 8,1% masuk kategori **Sedang**, 5 (lima) IKU atau 13.51 % masuk kategori **rendah** dan sisanya 1 (satu) atau 2.70% indikator kinerja utama dengan kriteria **sangat rendah**.

Indikator Kerja Utama dengan kategori Sangat Rendah, yaitu Tersedianya jaringan internet dan Web di beberapa SKPD hanya mencapai kurang 50% dari target. Dengan demikian terhadap beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan perlu menjadi perhatian pada tahun berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah telah menempatkan sasaran pertama “ Terselenggaranya Tata Pemerintah yang Baik” sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan pemerintah yang baik. Dalam rangka mencapai sasaran ini di dalam RPJMD telah di tetapkan empat indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	92.90	100	99.40	99,40	100
2	Jumlah Perda yang dikeluarkan	6	10	10	100	10
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	CC	CC	100	B



4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tinggi
---	--	--------	--------	--------	-----	--------

Sumber : Inspektorat, Bag. Organisasi, Bag. Adm Pemerintahan dan Bag. Hukum, 2017, data diolah

1. Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

Untuk mencapai sasaran “terselenggaranya tata pemerintahan yang baik” sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2017, Misi 1 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima, maka pencapaian **target indikator kerja utama yaitu Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal** merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Dalam suatu organisasi pasti akan selalu ada yang namanya temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, hal ini terjadi karena tidak ada kata sempurna, termasuk dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, yang penting dan harus menjadi fokus kita adalah bagaimana temuan hasil pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk diselesaikan, diperbaiki dan pada waktu berikutnya temuan ini tidak terjadi lagi.

Pada tahun 2016 target indikator kerja utama (IKU) yaitu Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal adalah 100% temuan dari target jumlah persentase keseluruhan temuan pada tahun 2016 yaitu 100% , yang terealisasi 99.40 % temuan internal dan eksternal yang berhasil ditindak lanjuti. Sehingga dari jumlah tersebut persentase realisasi temuan internal dan eksternal yang berhasil ditindak lanjuti yang dapat tercapai pada tahun 2016 adalah 99,40%, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Pada tahun 2015 jumlah temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti berjumlah 92,90 % temuan, artinya terjadi peningkatan sebesar 6,50% temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti dibandingkan tahun 2015.

Ketidak tercapaian target ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai permasalahan kasus tersebut baik di Inspektorat maupun SKPD tempat temuan didapat/terjadi.
- Keterbatasan pengetahuan para SDM di SKPD tentang tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
- Masih kurang teliti dan hati-hati para bendahara dan PPTK dalam pembuatan laporan keuangan



- d. Masih rendahnya keinginan pengelolaan keuangan untuk menyelesaikan secara cepat terhadap kasus yang menjadi temuan.

Solusi yang akan dilakukan dan diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah :

- a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- b. Memberi kesempatan kepada para pengelola keuangan dan pihak yang terkait untuk mengembangkan diri, seperti mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dan magang sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM.
- c. Memberikan sosialisasi dan arahan agar pihak-pihak pengelola keuangan agar dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam hal keuangan baik pelaksanaan realisasi maupun pembuatan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Memintah kepada setiap SKPD yang ada temuan pemeriksaan agar dapat segerah mungkin menyelesaikannya.

2. Jumlah Perda Yang Dikeluarkan

Terselenggarakannya tata pemerintahan yang baik merupakan sasaran strategis dari turunan misi pertama dalam RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera.

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan



dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik” terhadap **indikator Jumlah Perda yang dikeluarkan**, capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2016 target capaian dari indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau disetujui pihak legeslatif berjumlah 10 Peraturan Daerah seperti yang tercantum dalam Prolegda. Di sepanjang tahun 2016 terealisasi 10 Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau di setujui pihak legeslatif, yaitu :

1. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
3. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
4. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
5. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpanjang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
9. PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 10 PERDA Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Artinya persentase realisasi capaian untuk tahun 2016 mampu mencapai 100%, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**.

Pada tahun 2016 Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau disetujui pihak Legeslatif berjumlah 10 Perda sesuai dengan target yaitu sebanyak 10 Perda maka persentase realisasi yang dapat dicapai sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016



realisasi di tahun 2015 Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau disetujui pihak Legeslatif hanya berjumlah 8 Perda atau 61,54% dari target sebesar 13 Raperda, maka di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah Perda yang disetujui sebanyak 2 Perda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pencapaian target ini didukung oleh beberapa Indikator seperti :

1. Kesiapan SKPD inisiator dalam menyiapkan Raperda
2. Ketepatanwaktuan penetapan program pembentukan Perda oleh DPRD
3. Cepat nya proses pembahasan Perda di DPRD
4. Lancar nya proses Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah oleh Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini Bagian Hukum, Sekretariat DPRD dan SKPD yang menjadi inisiator dalam menyiapkan Raperda sudah harus lebih siap dan profesional.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga Negara. Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017, perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.



Gambar III.1 Kegiatan Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan OPD Kabupaten Bengkulu Tengah



Dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik” terhadap **indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** capaian kinerja sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah kategori CC terealisasi CC, telah tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Baik** Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 sebesar 53,39 dengan kategori CC. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2017.

Capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berada di atas rata-rata capaian Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bengkulu, di mana nilai AKIP Kabupaten Kota lain Rata-rata hanya mendapat C. Tahun 2016 terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat C dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil meraih peringkat CC. Prestasi ini tercapai karena adanya komitmen semua pihak, yaitu dari pucuk pimpinan sampai pada tataran pelaksana.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu :

- a. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Rencana Strategis pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukan keberhasilan pencapaian target.
- b. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur.
- c. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran, atau belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan kedalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ditingkat eselon III dan IV.
- d. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan.



- e. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai.
- f. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program.
- g. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Evaluator Kemenpan & RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD dan Rencana Strategis masing-masing SKPD untuk memastikan bahwa Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome* ;
2. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan, spesifik, terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja. Kejelasan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan rencana Aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya;
5. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan;

Untuk melaksanakan rekomendasi dari Tim Evaluator Kemenpan & RB di tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :



- a. Meningkatkan koordinasi, persamaan persepsi dan pelatihan di seluruh SKPD.
- b. Membangun sistem Aplikasi E-Sakip sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat sebagai upaya pembangunan sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat.
- c. Melakukan pendampingan dan pelatihan dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan narasumber lain yang kompeten.
- d. Untuk rencana kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh SKPD dan pihak yang berkompeten, peningkatan SDM melalui pelatihan bagi seluruh SKPD dan perbaikan kinerja sebagai upaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh SKPD yang pada akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017, perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima”.

Dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik” terhadap **indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target tahun 2016 dengan nilai sedang, terealisasi 100%. ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Kondisi Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum bisa mencapai nilai yang lebih tinggi dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat menyajikan data pendukung yang lengkap yang harus tersaji dalam LPPD, hal ini dikarenakan sistem penilaian LPPD harus menggunakan data pendukung.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah.



Untuk meningkatkan hasil Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKPPD di tahun 2017 akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan
- b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah



Gambar III.2 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Mengikuti upacara HUT Kabupaten Bengkulu Tengah ke-8 Tahun 2016

Menjadikan aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di pemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam tugas pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal. Alur pikir pengembangan kapasitas aparatur atau untuk lebih lengkapnya kita sebut sumber daya manusia aparatur pemerintah

Pengembangan kapasitas atau capacity building aparatur pemerintah daerah akan lebih mengena apabila diawali dari inventarisasi permasalahan kaitannya dengan



harapan-harapan yang diinginkan oleh para pengguna jasa layanan pemerintah daerah, diantaranya adalah kemudahan dalam berbagai pengurusan kepentingan, tidak membedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain, perlakuan yang adil, jujur, transparan dan wajar. Dari inventarisasi permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan akan didapatkan standar atau ukuran tingkat kepuasan masyarakat minimal yang diinginkan. Bertolak dari hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemecahan permasalahan dengan menggunakan metoda-metoda analisis manajemen. Di dalam manajemen terpadu aparatur hanyalah salah satu bagian saja di dalam sistem atau ruang lingkup di pemerintah daerah, sehingga faktor-faktor lain di luar aparatur itu sendiri perlu direspon sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dalam rangka mengukur keberhasilan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian sasaran
Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan	85	10	10	100	20
2	Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar	11	10	10	100	15
3	Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan	504	62	62	100	100

Sumber : BK-PSDM dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah

1. Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah” terhadap **indikator persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan**, pada tahun 2016 target terhadap indikator persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan adalah 10 PNS dengan pembagian Eselon IV atau Diklat PIM IV sebanyak 5 (lima) PNS dan Eselon III atau Diklat PIM III sebanyak 5 (lima) PNS. Dari Target 10 PNS yang ditetapkan pada tahun 2016 Terealisasi sebanyak 10 PNS sehingga



persentase realisasi capaian 100% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Kalau dilihat dari target tahun 2016 angka 10 PNS merupakan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Eselon yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan masih sangat terbatasnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan Diklat PIM, namun yang dapat dijadikan perhatian dan rasa bangga adalah besarnya keinginan para pejabat yang menduduki Jabatan untuk mengikuti Diklat PIM sangat besar ini tercermin dari panjangnya daftar tunggu calon peserta Diklat PIM. Kedepan yang akan coba dilakukan adalah dengan mengusulkan ke Satuan Tiga untuk penambahan anggaran Diklat PIM dan juga jika dipandang perlu Hearing dengan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk tahun 2017 di targetkan 20 Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan, artinya ada peningkatan target sebesar 100% dari target tahun 2016.

2. Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar.

Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah salah satu bentuk kesempatan untuk meng-*upgrade* pendidikan yang akan sekaligus sangat membantu dalam meniti karier. Tidak dipungkiri pendidikan menjadi salah satu dasar dalam penentuan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi. Sebagai contoh khusus tugas belajar S1 bisa digunakan oleh PNS untuk penyesuaian pangkat ke pangkat golongan III secara otomatis tanpa menunggu adanya ujian penyesuaian, dengan catatan ada formasi.

Seorang PNS jika ingin melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan seterusnya bisa memilih melalui tugas belajar atau ijin belajar. Keduanya memiliki perbedaan. Menurut Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 1961 tugas belajar diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing, suatu badan internasional, atau badan swasta asing. Jadi tugas belajar itu gratis karena pembiayaannya tidak dibebankan pada PNS melainkan oleh Negara atau bantuan Pemerintah Asing/Swasta Asing. Tentu saja untuk memperolehnya dilakukan seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pemberian tugas belajar berdasarkan poin 3.1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2013.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah” terhadap **indikator Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar**, pada tahun 2016 target Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan



Tugas Belajar adalah 10 PNS, terealisasi 10 PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar sehingga persentase realisasi 100% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat baik**. pada tahun 2015 capaian target yang dicapai adalah 11 jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar dan pada tahun 2017 target capaian dinaikan lagi menjadi 15 orang PNS. Kecilnya target yang ditetapkan pada tahun 2016 dikarenakan anggaran yang disediakan untuk biaya Tugas Belajar masih sangat kecil, hal ini dapat dimaklumkan karena Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten Termuda di Provinsi Bengkulu buah dari hasil Pemekaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada akhir tahun 2008. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun target yang ditetapkan terus mengalami kenaikan, ini menandakan adanya peningkatan perhatian pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal memberikan kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikannya yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada kinerja PNS. Sebagai contoh Dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk biaya tugas belajar di biayai oleh BPKP melalui program kerjasama Bea Siswa “STAR” antar Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dengan BPKP.

3. Jumlah Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan

Ijin belajar berbeda dengan tugas belajar. Pendidikan yang ditempuh dengan ijin belajar dibiayai dengan biaya sendiri oleh PNS dan tidak hilang kewajiban bekerja di kantor (tidak meninggalkan jabatannya). Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang ijin belajar sesuai dengan butir 3.2. Surat Edaran Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013. Sejalan dengan hal diatas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu memberi dukungan kepada PNS untuk selalu meningkatkan jenjang pendidikan PNS melalui jalur Izin Belajar baik melalui kemudahan perizinan maupun hal lainnya.

Untuk itu dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah” terhadap **indikator jumlah dokumen izin belajar yang dikeluarkan**, pada tahun 2016 target jumlah dokumen izin belajar yang dikeluarkan adalah 62 dokumen izin belajar, terealisasi 62 dokumen izin belajar yang diterbitkan sehingga persentase realisasi 100% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat baik**. Pada tahun 2015 capaian target yang dicapai adalah 148% atau 70 dokumen izin belajar yang dikeluarkan dari target 50 dokumen izin belajar yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 target capaian 100% dari target dokumen izin belajar yang dikeluarkan.



3. Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Diantara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses produksi akan bisa dilakukan lebih efektif dan efisien, oleh karena itu di daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong masih belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Tingkat kerusakan jalan mencapai 38,96%. Kondisi ini jelas tidak kondusif bagi upaya-upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam ini mungkin bukan masalah jika tersedia dana yang memadai. Sebagai kabupaten pemekaran anggaran untuk kepentingan pembangunan tentu masih relatif terbatas. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya atau antara desa dengan kota kabupaten dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, pembangunan fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Sarana Pendidikan, pasar rakyat serta pembangunan gedung/kantor pemerintahan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur. Karena dengan semakin membaiknya kualitas infrastruktur maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun ekonomi secara mandiri. Dalam rangka mengukur keberhasilan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan 4 (empat) indikator capaian keberhasilannya di sajikan dalam table III.5 sebagai berikut :

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Proporsi panjang jalan kondisi baik	174.33	324.33	252.50	61,04	70
2	Panjang jalan yang terbangun	60.08	230	138.25	60,11	82.93
3	Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi	1.054	3.000	2.105	70,17	2.500
4	Jumlah gedung/kantor yang dibangun	5	8	6	75	5

Sumber : Dinas DPU-TR dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016



1. Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik



Gambar III.3 Infrastruktur Jalan Kondisi Baik

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur” terhadap **indikator proporsi panjang jalan kondisi baik**, dari tahun ke tahun target capaiannya selalu meningkat, yang mana pada tahun 2015 capaian target yang dicapai adalah 174,33 Km jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2016 target capaian yang harus di capai dinaikkan lagi menjadi 324,33 Km, artinya ada penambahan target realisasi sebanyak 150 Km panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2015. Dari target proporsi panjang jalan kondisi baik sepanjang 324.33 Km, terealisasi sepanjang 252.50 Km artinya persentase realisasi capaian atas target kinerja yang sudah ditetapkan hanya sebesar 61.04%, dengan ini, maka hasil kinerja sasaran ini adalah **Rendah**. Kalau dilihat dari persentase realisasi capaian mengalami penurunan, namun kalau dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan kenaikan sebesar 78,17 Km jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Penurunan persentase target capaian ini terjadi dikarenakan beberapa hal seperti :

1. Keterbatasan dana dalam pembangunan, perawatan dan perbaikan infrastruktur jalan
2. Keterbatasan dalam SDM dan Peralatan
3. Kendaraan yang melewati jalan melebihi tonase yang seharusnya sesuai dengan kelas jalan
4. Lokasi jalan yang berada pada posisi yang cukup sulit dicapai karena rata-rata berada di pedesaan dan di daerah pedalaman
5. Curah hujan yang tinggi
6. Kondisi jalan yang memang sudah tidak bagus



Untuk itu pada tahun 2017, akan diupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan melalui peningkatan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan yang bersumber dari pendanaan APBD dan APBN.

3. Panjang Jalan Yang Terbangun



Gambar III.4 Infrastruktur Jalan Menuju Kantor Camat Karang Tinggi

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan, maka dalam APBD 2016 Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana yang cukup besar, yaitu 195.600.382.334.90, hal ini mengingat kabupaten Bengkulu Tengah adalah kabupaten pemekaran. Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur” terhadap **indikator panjang jalan yang terbangun**, pada tahun 2016 di targetkan panjang jalan yang terbangun adalah 230 Km dan yang dapat direalisasi sepanjang 138.25 Km, sehingga persentase realisasi capaian hanya sebesar 60,11%, atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Rendah**. Kalau dilihat dari persentase realisasi capaian mengalami penurunan, namun kalau dilihat dari panjang jalan yang terbangun menunjukkan kenaikan sepanjang 78,17 Km jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 target untuk indikator panjang jalan yang terbangun ditargetkan bertambah sepanjang 150 Km.

Tidak tercapainya target panjang jalan yang terbangun di tahun 2016 ini terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterbatasan atas ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan baik dana yang bersumber dari APBD maupun dana yang bersumber dari APBN.
2. Ketidaksesuaian antara penetapan target yang ditetapkan dengan kemampuan anggaran yang bisa dialokasikan untuk kegiatan program pembangunan jalan.



4. Panjang Jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi



Gambar III.5 Pembangunan Saluran Irigasi

Dalam menunjang pembangunan pertanian khususnya peningkatan produksi padi maka peran infrastruktur berupa pembangunan maupun pemeliharaan saluran irigasi mempunyai peranan yang sangat penting, dengan tidak mengesampingkan factor-faktor lain seperti bibit, pupuk dan kemampuan SDM petani itu sendiri.

Untuk menunjang pembangunan pertanian dimaksud maka dalam sasaran “Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur” terhadap pencapaian target **indikator Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi** adalah sangat penting, pada tahun 2016 target Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi adalah 3.000 M, terealisasi 2.105 M sehingga persentase realisasi mencapai 70.17% terhadap target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sedang**. Kalau dilihat dari persentase realisasi capaian mengalami penurunan, namun kalau dilihat dari Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi menunjukkan kenaikan sepanjang 1.051 M jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 target untuk indikator Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi ditargetkan sepanjang 2.500 M. Tidak tercapainya target Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi di tahun 2016 ini terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

adalah:

1. Keterbatasan atas ketersediaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi baik dana yang bersumber dari APBD maupun dana yang bersumber dari APBN.
2. Ketidaksesuaian antara penetapan target yang ditetapkan dengan kemampuan anggaran yang bisa dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.



4. Jumlah Gedung / Kantor yang di Bangun

Bangunan kantor yang layak untuk ditempati sebagai tempat kerja adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Bengkulu Tengah.

Untuk itu dalam menunjang pelaksanaan birokrasi dan pelayanan publik yang baik maka dalam sasaran “Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur” terhadap pencapaian target **indikator jumlah gedung/kantor yang dibangun** adalah sangat penting,

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kabupaten pemekaran, yang mana sampai akhir tahun 2015 baru terbangun 15 bangunan gedung/kantor baru yang digunakan untuk kantor SKPD. Pada tahun 2016 target pembangunan gedung/kantor adalah 8 gedung/kantor baru, yang terealisasi selesai terbangun berjumlah 6 gedung/kantor, sehingga persentase realisasi telah mencapai 75% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **sedang**. Hal ini terjadi karena 2 (dua) gedung/kantor ini dibiayai dengan 2 (dua) tahun anggaran, yang mana sesuai rencana akan selesai pada tahun 2017. Untuk tahun 2017 target untuk indikator pembangunan gedung/kantor baru ini adalah pembangunan 5 gedung/kantor baru.





Gambar III.6 Pembangunan Gedung/Kantor Baru
Di Pusat Perkantoran Renah Semanek Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Sasaran Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Tengah masih bertumpuh pada pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada saat ini, yang mana sumber-sumber PAD tersebut meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan misi I dalam RPJMD 2012-2017 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten Pemekaran dan masih tergolong masih sangat mudah, namun demikian semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pengelolaan keuangan sudah meraih WTP dari penilaian BPK. Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan
Dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2016)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, restribusi dan pendapatan lain	8.755.330.989	9.971.443.429	9.228.942.859	106,55	12,6 M
2	Opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah



1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak, Restribusi dan Pendapatan Lain

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU.No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

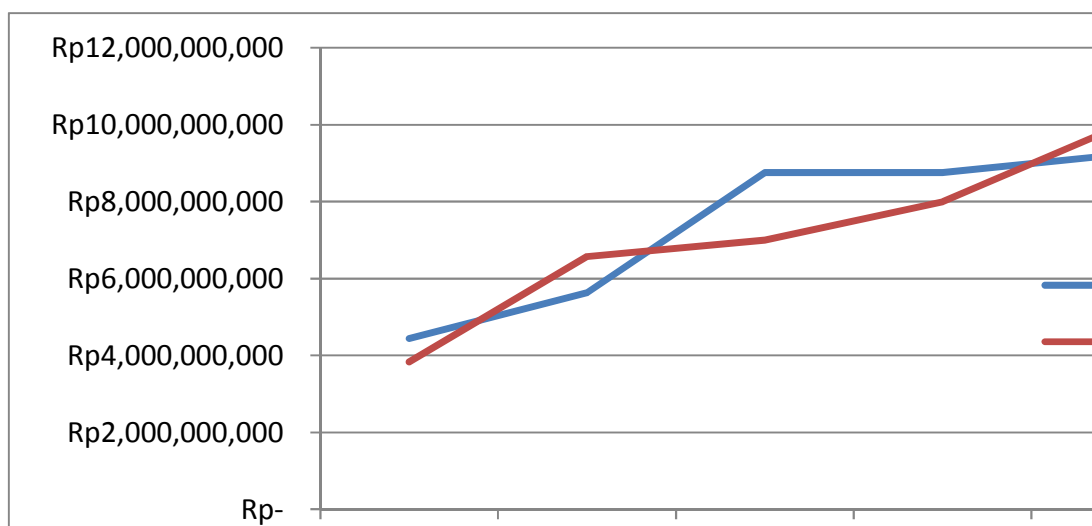
Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.



- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Gambar III.7 Grafik PAD Tahun 2012 s/d Tahun 2016

Dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap **indikator jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak, restribusi dan pendapatan lain yang sah**, dari tahun ke tahun selalu meningkat, yang mana pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.755.330.989. Pada tahun 2016, target kinerjanya adalah Rp. 9,971.443.429 , dan hasilnya hampir memenuhi target yaitu sebesar Rp. 9.228.942.859 ,- atau 92 ,55% , dengan ini, maka hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**,



Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun 2016 ini bersumber dari :

1. Pajak daerah yang meliputi: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak reklame, d) Pajak Penerangan Jalan, e) Pajak Mineral bukan logam dan batuan, f) Pajak Air bawah tanah, g) Sarang burung wallet, h) Pajak BPHTB, i) PBB Pedesaan dan perkotaan.
2. Restribusi meliputi: a). Restribusi, Pemakaian kekayaan daerah, b) Restribusi Izin gangguan keramaian, c) Restribusi Izin usaha perikanan, d). Restribusi Pelayanan pasar, e) Restribusi Pelayanan kesehatan, f) Restribusi pelayanan parker ditepi jalan umum, g) Restribusi Terminal, h) Restribusi tempat rekreasi dan olahraga, i). Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan, j) Restribusi Pemakaian kekayaan daerah, k) Restribusi Izin mendirikan bangunan.
3. a) Penerimaan jasa giro, b) Penerimaan lain-lain, c) Dana kapitasi JKN
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Untuk tahun 2017 target capaian untuk sasaran meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah terhadap indikator jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak, restribusi dan pendapatan lain yang sah. Untuk merealisasikan capaian target ini, pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah harus terus mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru serta terus meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD yang sudah ada.

2. Opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pelaksanaan indikator **Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan** sejalan dengan misi “Sasaran Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah” yang menjadi misi 1 dalam RPJMD 2012-2017. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.



Gambar III.8 Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. FERRY RAMLI, SH.,MH.
Menerima Penghargaan WTP dari BPK-RI

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil sangat baik. Pada tahun 2016, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**.

Pencapaian WTP ini merupakan tahun keenam. Capaian kinerja WTP ini didapat mulai tahun 2010 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang dikeluarkan BPK tahun 2016. Hal ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah, diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut.

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh



Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, yaitu tetap diperlukan penguatan komitmen seluruh pihak, baik pimpinan puncak maupun Kepala SKPD serta seluruh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Sasaran Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas dan rentang daerah yang cukup luas, penduduk yang tersebar tidak merata di daerah-daerah pedesaan dan letaknya terpencil namun memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang besar. Namun, kelebihan ini juga membawa beberapa tantangan di dalam mengelola seluruh sumberdaya yang ada dan untuk membawa daerah ini semakin maju. Salah satu contoh tantangan adalah kondisi geografis daerah yang membentang dari Barat ke Timur yang diselingi dengan perbukitan, lembah dan jurang. Kondisi ini pasti menyulitkan pelaksanaan beberapa program pemerintah yang membutuhkan kecepatan dan keluasaan. Salah satu program utama yang dapat mengatasi permasalahan ini adalah dengan membangun infrastruktur komunikasi dan informasi. Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam	3	40	37	92,50	40
2	Jumlah SKPD yang memiliki jaringan Web	3	28	9	32.14	28

Sumber : Dishubkominpar dan Bag. Organisasi, 2016, data diolah

1. Jumlah Jaringan Komunikasi/Stasioner Telepon Genggam

Jaringan telekomunikasi saat ini menjadi sebuah hal yang mendasar terhadap perekonomian dan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pesat nya



yang terus berkembang sejak *abad 20* hingga saat ini. Hal ini dapat menjadi indikator bagi perkembangan ekonomi maupun sosial yang ada.

Jaringan telekomunikasi memberikan masukan yang positif untuk dunia bisnis dan dapat mendongkrak perekonomian hingga tahap yang menggembirakan. Saat ini telekomunikasi dapat dijangkau baik secara lokal maupun global. Dengan cara ini, hal ini dapat menunjang perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia.

Masyarakat sekarang tentunya sudah tidak asing dengan apa itu telekomunikasi dan jaringan. Adapun Manfaat jaringan komunikasi bagi masyarakat adaah sebagai berikut :

1. Menambah Wawasan
2. Mempermudah Komunikasi
3. Mempermudah pekerjaan
4. Sarana Pendidikan Jangkauan jauh
5. Belanja Online

Dalam mencapai sasaran “Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi” terhadap **indikator jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam**, pada tahun 2016 target jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam adalah 40 jaringan stasioner, terealisasi sebesar 37 jaringan stasioner sehingga persentase realisasi hanya 92,50% dari target ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Pada tahun 2016 capaian target terhadap jaringan stasioner yaitu sebesar 37 jaringan stasioner artinya jika dibandingkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase realisasi capaian yang sangat signifikan, Pada tahun 2017 target untuk indikator ini tetap dipertahankan di angka 40 jaringan stasioner yang tersedia. Tidak tercapainya target jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam di tahun 2016 dikarenakan didalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hanya dapat memberikan dukungan dalam kemudahan regulasi dan perizinan sedangkan keputusan dilaksanakan atau tidak pembangunannya sepenuhnya wewenang pihak swasta, karena kepemilikannya juga milik swasta, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hanya mengusulkan saja.

2. Jumlah SKPD yang memiliki Jaringan Web.

Organisasi pemerintah yang berbasis kepada Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting dalam abad ke dua puluh satu di era milineum ketiga ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat



dan tepat waktu. Kekuatan suatu organisasi pemerintahan akan sangat tergantung kepada informasi atau pengetahuan yang dimilikinya, informasi akan menjadi perekat unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi.

Organisasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi akan berkembang dengan cepat bersamaan dengan makin tersedianya perangkat komputer yang murah dan mudah didapat. Beberapa periode yang lalu sedikit sekali orang mendapatkan manfaat dari penggunaan komputer. Namun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang realtime sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, handphone dan gadget yang terbaru melalui jaringan internet. Penggunaan internet mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web*.

Sejalan dengan itu, peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu portal website. Dengan adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara G2C (*Government to Citizen*). Fungsi lainnya adalah G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*).

Pada perkembangannya fungsi website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Seperti telah di jelaskan dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang mana berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan



akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu dengan adanya pemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mencapai sasaran “Terpenuhnya Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi” terhadap **indikator Tersedianya Jaringan Internet dan Web di Beberapa SKPD**, pada tahun 2016 target Tersedianya Jaringan Internet dan Web di Beberapa SKPD adalah 28 jaringan internet/Web, terealisasi sebesar 9 jaringan internet/Web sehingga persentase realisasi 32.14% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Rendah**. Pada tahun 2015 capaian target terhadap jaringan internet/Web sebesar 100% dari target 3 Web dan yang terealisasi 3 Web. Pada tahun 2017 target untuk indikator ini adalah tetap 28 jaringan internet/Web. Tidak tercapainya target di tahun 2016 terhadap indikator Tersedianya Jaringan Internet dan Web di Kabupaten Bengkulu Tengah, disebabkan oleh :

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Belum/terbatasnya akses jaringan internet dalam Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Terbatasnya kemampuan SDM dalam bidang IT di Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Kondisi Infrastruktur Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum begitu baik.

Untuk itu pada tahun 2017 agar target tercapai adalah dengan menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk program penyiapan jaringan Web di Organisasi Perangkat Daerah. Karena kedepan antara pekerjaan dan teknologi komunikasi tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mendukung.

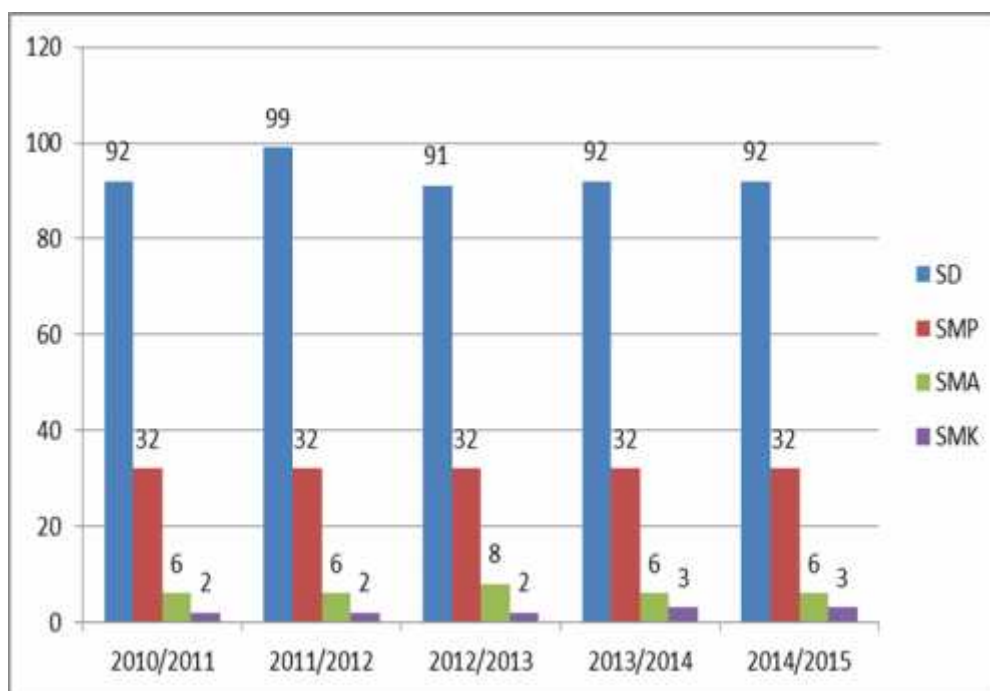
6. Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan

Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan. Karena hanya dengan pendidikan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengadaptasi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Berbagai permasalahan yang muncul terkait pendidikan nasional, mulai fasilitas pendidikan yang memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Ditambah lagi akses pendidikan yang saat ini kurang dapat dinikmati oleh masyarakat karena masalah ekonomi sehingga akan



semakin membuka jurang pemisah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan karena lemahnya faktor ekonomi menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan sehingga tentunya akan mengganggu laju pembangunan nasional. Berdasarkan atas permasalahan tersebut sehingga memberikan inisiatif kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selalu focus dalam membangun sektor pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan harus diatasi dan dicari solusi pemecahannya.

Di era otonomi daerah urusan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) menjadi tanggung jawab daerah, sehingga masa depan pendidikan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Program pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah meningkatkan kualitas, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan termasuk bagi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak di daerah terisolir dan terpencil, relevansi antara bidang pendidikan yang diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja serta sumber daya alam yang ada. Fasilitas pendidikan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pendidikan. Dengan tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas yang memadai akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Sumber : BPS (Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016)

Gambar III.9 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah



Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :

**Tabel III.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Mutu Pendidikan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar	94,5	100	96,5	96,5	100
2	Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar	9	9	9	100	9
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	83,5	100	85,5	85,5	90
4	Rasio Guru/murid	100	100	100	100	100
5	Angka melek huruf	84	86,68	86,68	100	90

Sumber : Dinas Dikpora dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah

1. Angka Partisipasi Murni (APM) pada Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Rumus :

$$APM = \frac{\text{Jml murid kelp usia sekolah di jenjang pendidikan tententu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun



Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Mutu Pendidikan” terhadap **indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar**, pada tahun 2016 target Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar adalah 100%, terealisasi sebesar 96,5% sehingga persentase realisasi 96,5% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Artinya di Kabupaten Bengkulu Tengah banyaknya anak usia pendidikan dasar yang bersekolah pada Pendidikan Dasar mencapai 96.5% dari total jumlah anak yang berusia pendidikan dasar yang bersekolah. Pada tahun 2015 capaian target terhadap rasio Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar yaitu sebesar 94,5% artinya pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 2.5%, Pada tahun 2017 target untuk indikator ini tetap dipertahankan di angka 100%.

Tidak tercapainya target Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar sebesar 2.5% dari target 100% di tahun 2016 bukan karena ketidaksiapan pemerintah namun lebih dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Untuk itu di tahun 2017 lewat sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya pendidikan untuk anak akan terus ditingkatkan dan dilakukan pada setiap kesempatan.

2. Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar

Salah satu komponen yang penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, yang mana rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. **Indikator rata-rata lama sekolah** yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar (SD) hingga tingkat Pertama atau SLTP.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator kinerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **Sangat Baik**, karena mencapai 100% dari target yang telah dirumuskan. Pencapaian rata-rata lama sekolah adalah 9 tahun sesuai dengan target sebesar 9 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah dari kurun waktu mengalami peningkatan, peningkatan rata-rata lama sekolah di kabupaten Bengkulu Tengah ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bengkulu Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas pendidikan yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pendidikan Paket “A” dan Paket “B”

Permasalahan :

1. Masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak.
2. Anak usia sekolah menengah memasuki dunia kerja.
3. Peningkatan pernikahan dini.

Solusi :

1. Memfokuskan program pengentasan buta huruf pada kelompok orang tua, agar orang tua dapat cepat memahami akan pentingnya pendidikan.
2. Koordinasi lintas sektor dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
3. Sosialisasi dan penyuluhan dikalangan orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah

3. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar

Indikator Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kabupaten pemekaran dengan serba keterbatasannya tentu saja menghadapi masalah yang serius dalam pemenuhan infrastruktur untuk pelayanan publik, salah satunya adalah infrastruktur dibidang pendidikan. Ketersediaan fasilitas utama penunjang dalam bidang pendidikan seperti



gedung sekolah dan kelengkapan lainnya adalah sangat penting dan pemerintah terus berusaha untuk memenuhinya.

Pada tahun 2016 pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar menunjukkan capaian kinerjanya **Tinggi**, karena telah mencapai 85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Artinya di tahun 2016 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencapai 85.5%. Persentase Realisasi di tahun 2016 ini jika dibandingkan dengan persentase realisasi di tahun 2015 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2015 capaian persentase realisasi hanya 83,5%. Untuk tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan target sebesar 90%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program pembangunan infrastruktur pendidikan yang dilakukan baik Pemerinta Pusat melalui dana APBN maupun pemerintah daerah melalui dana APBD.

Permasalahan :

1. Masih terbatasnya anggaran yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, baik melalui dana APBD maupun Dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus.
2. Banyaknya gedung sekolah yang rusak karena umur bangunan sudah tua dan untuk mengembalikan fungsi bangunan tersebut harus di renovasi yang membutuhkan dana yang besar.
3. Banyaknya Hambatan yang di jumpai dilapangan dalam pembangunan sarana pendidikan, seperti lambatnya waktu pembebasan lahan dan lain sebagainya.

Solusi :

1. Memperbesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, khususnya pembangunan gedung sekolah baru.
2. Memaksimalkan penggunaan gedung sekolah yang sudah ada
3. Menanamkan kesadaran bagi warga sekolah untuk merawat dengan baik bangunan sekolah yang sudah ada.
4. Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui kerjasama pembangunan sarana penunjang pendidikan seperti jalan dan penyediaan buku-buku pelajaran.



4. Rasio Guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.

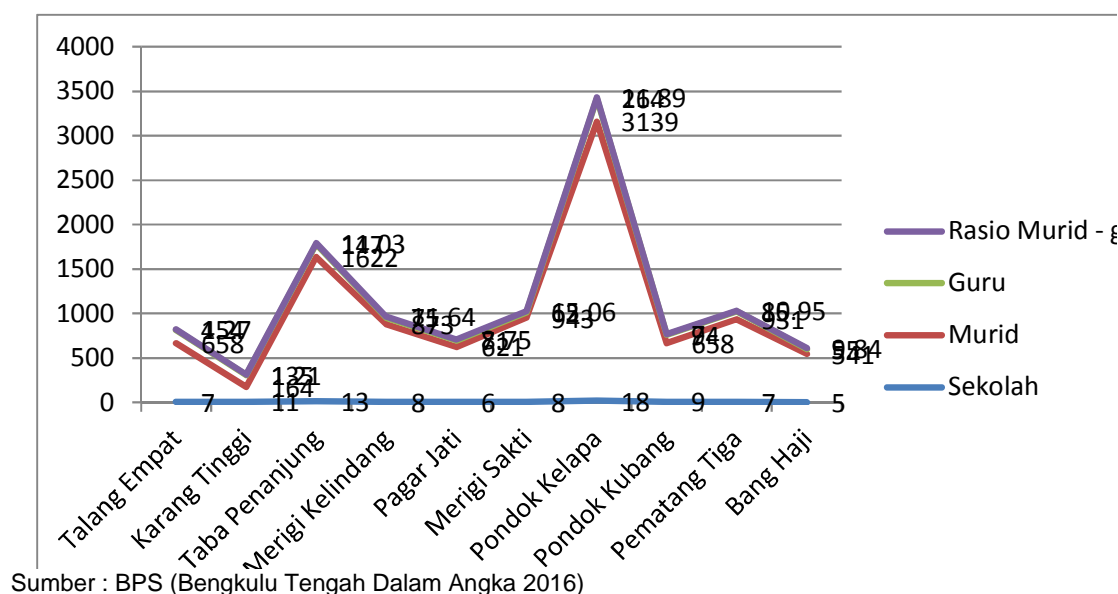
Pada sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut:

- a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
- b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
- c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
- d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
- e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
- f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
- g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
- h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
- i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Mutu Pendidikan” terhadap **indikator rasio guru/murid**, pada tahun 2016 target rasio guru/murid adalah 100%, terealisasi sebesar 100% sehingga persentase realisasi 100% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Artinya kalau dilihat dari angka rasio 100% guru/murid, menunjukan rasio guru terhadap jumlah peserta didik sudah merupakan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17. Walaupun dilapangan sebenarnya tidak demikian, tetap terjadi kekurangan akan jumlah guru, hal ini terjadi karena kebutuhan akan guru belum dilihat secara spesifik per tingkat jenjang pendidikan maupun per mata pelajaran. Sebagai perbandingan saja pada tahun



2015 capaian target terhadap rasio guru/murid sama yaitu 100%, dan pada tahun 2017 target untuk indikator ini tetap dipasang di angka 100%.



Gambar III.10 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Guru/Murid Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah

Kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan manfaat dari angka rasio guru terhadap murid yang memncapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Menumpuknya guru-guru di sekolah pavorit
2. Menumpuknya guru di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota
3. Susahnya melaksanakan pemerataan guru diseluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah karena sebagian guru enggan dipindahkan ke daerah pedesaan atau pedalaman yang akses transportasinya cukup sulit.
4. Cukup sulit memenuhi kebutuhan akan guru yang mengajar mata pelajaran khusus seperti guru seni rupa, kimia dan lain-lain.

Hal-hal yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan capai target terhadap rasio guru terhadap murid adalah :

1. Melaksanakan pemeratan guru yang mengajar di sekolah-sekolah dalam wilayah kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil.
3. Memperbaiki infrastruktur transportasi agar akses ke sekolah yang ada di pedalaman dapat akses dengan lancar.



5. Angka melek huruf

Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. **Indikator angka melek huruf** ini menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah, angka Melek Huruf di Kabupaten Bengkulu Tengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Penuntasan buta aksara di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

Pada tahun 2016 realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif, realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 86.68%, dengan pencapaian 100% dari target 86,68%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**. Artinya masyarakat/penduduk yang melek huruf atau bisa baca tulis di kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun 2016 sudah mencapai 86.68% dari jumlah penduduk.

Capaian ini dapat terjadi karena beberapa kegiatan yang telah dilakukan, baik peran dari pemerintah seperti program Wajib Belajar 9 tahun dan Program Paket “A”, “B” dan Paket “C”. Selain itu juga adanya kontribusi dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Hal lain yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan angka melek huruf Kabupaten Bengkulu Tengah salah satunya adalah Perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan Perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 10 Kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hambatan yang dijumpai di lapangan dalam pengentasan buta huruf adalah dari sisi cukup banyaknya penduduk usia lanjut yang tinggal di daerah pedalaman di dalam Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu juga cukup sulitnya akses menuju ke daerah pedesaan yang berada di pedalalaman serta masih kurangnya tenaga di bidang pendidikan.



7. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, berdasarkan data Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2016, saat ini, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 20 unit, Puskesmas Pembantu 18 unit dan Puskesmas keliling 18 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.



Gambar III.11 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas

Fasilitas kesehatan yang di siapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya, jarak transportasi serta kondisi jalan dan lokasi penyebaran penduduk yang tidak merata. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu ketersediaan mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah



oleh masyarakat. Dalam hal tenaga kesehatan, Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita	100	87	87	100	100
2	Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	88.8	92	78.72	78.72	92
3	Persentase penanganan balita gizi buruk	6(100%)	100%	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bag. Organisasi 2017, data diolah

1. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Masa Balita dapat dikatakan sebagai masa kritis untuk tumbuh kembang anak, oleh karenanya penting bagi orang tua untuk mempertahankan masa pertumbuhan serta perkembangan di masa ini, hal ini tentunya akan menentukan pertumbuhan serta perkembangan pada masa berikutnya. Untuk itu pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu indikator kinerja yang dipilih adalah Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Cakupan pelayanan anak balita (12-59 bulan) adalah persentase anak balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan.

Rumus :

Cakupan pelayann anak balita	x 100%
Jumlah anak balita dalam satu tahun	

Dalam mencapai sasaran “Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” terhadap **indikator persentase cakupan pelayanan kesehatan anak balita**. Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas



Kesehatan meletakkan target persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita sebesar 87% dengan capaian realisasi 100% dengan jumlah cakupan pelayan Balita sebanyak 2.934 balita, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**. Artinya dalam tahun 2016 dari target 87% pelayanan kesehatan terhadap anak balita yang dapat direalisasikan sebanyak 2.934 balita atau 100% sesuai dengan yang di targetkan. Namun dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada anak balita cukup banyak hambatan yang di jumpai, antara lain :

1. Masih banyak dari sebagian ibu hanya membawa balitanya ke sarana kesehatan bila sakit saja sedangkan pada usia ini banyak pelayanan kesehatan yang bisa diberikan seperti pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak (SDIDTK), pemberian vitamin A dan pelayanan kesehatan lainnya, masih belum optimalnya pemanfaatan buku KIA dan posyandu di masyarakat, pencatatan pelaporan baik, namun belum sesuai dengan definisi operasional yang ada, dan belum adanya kerjasama dengan guru PAUD sebagai perpanjangan tangan puskesmas untuk menjangkau balita mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Masih ada ibu yang membawa anak-anak berobat bukan pada fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh dinas kesehatan tapi lebih memilih ke pada tenaga non kesehatan seperti dukun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini yaitu tetap meningkatkan keterampilan SDM yang ada melalui kegiatan teknis maupun non teknis, meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, posyandu, optimalisasi kembali penerapan buku KIA, Kohort bayi dan balita, penerapan MTBS, dan program-program teknis yang harus diterapkan di puskesmas, meningkatkan kerjasama jejaring program kesehatan anak dari level desa sampai ke tingkat provinsi seperti guru PAUD, kader, toma, dll serta kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi dan pemantauan pasca pelatihan program kesehatan anak di puskesmas.

2. Persentase Ibu Bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.

Kesehatan Ibu merupakan prioritas pembangunan kesehatan baik secara nasional maupun Internasional yang mana hal ini menjadi bagian dari Tujuan (Goals) SDGs Tahun 2016-2030. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan.

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan



kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn).

Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Dalam mencapai sasaran “Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” terhadap **indikator persentase ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih** pada tahun 2016, untuk indikator persentase ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih di targetkan sebesar 92%, yang mana target ini sama dengan Target Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 92%, dengan realisasi pelaksanaan sebesar 78.72% atau 1.872 ibu bersalin yang dapat di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Tinggi**. Artinya untuk angka persentase ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih di kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2016 mencapai angka 78.72% atau 1.872 jiwa, sisanya sebesar 21.28% ibu bersalin di tolong oleh tenaga yang belum terlatih. Capaian realisasi target di tahun 2016 sebesar 78.72% dapat terjadi karena kegiatan ini didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih serta selalu diarahkan untuk ditolong dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai dengan metode pertolongan persalinan yang sudah sesuai dengan standar kesehatan.

- Hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan indikator ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten tidak ditempatkan di Desa-desa.
- Upaya Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah di tahun 2016 untuk meningkatkan keberhasilan adalah dengan :
 - Mengadakan pelatihan APN bagi bidan
 - Mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat yang belum terjangkau

Untuk perbandingan saja pada tahun 2015 untuk indikator persentase ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih dari target realisasi sebesar 90% terealisasi sebesar 89% atau 2.115 ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan persentase capaian 89%. Pada tahun 2017 untuk indikator persentase ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih tetap ditargetkan pada angka 92%.



3. Persentase Penanganan Balita Gizi Buruk.

Gizi buruk pada balita merupakan persoalan yang masih tergolong sangat sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk pada balita, namun sayangnya permasalahan ini tak kunjung selesai begitu saja. Baik oleh kesadaran dari orang tua yang kurang paham dan karena penyuluhan pemerintah yang tak sampai ke mereka. Walaupun permasalahan gizi pada balita ini telah sampai informasinya kepada masyarakat baik perkotaan maupun desa mereka tetap tidak bisa mengatasi masalah ini. Lalu kenapa? karena permasalahan ekonomilah yang menjadi masalah terbesar dari fenomena ini.

Gizi buruk dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kondisi kurang gizi tingkat berat yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi energi serta protein dari semua makanan yang dimakan sehari-hari dan pola makan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam mencapai sasaran “Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” terhadap **indikator persentase penanganan balita gizi buruk**, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada RPJMD 2012-2017 menargetkan mengatasi permasalahan penanganan balita gizi buruk dengan target 100%. Maknanya setiap timbul permasalahan balita yang mengalami gizi buruk akan segera diatasi dengan cepat dan tepat. Pada tahun 2016 kasus balita gizi buruk berjumlah 3 orang balita dan semua kasus balita gizi buruk ini dapat diatasi dengan baik. Artinya capaian realisasi pada indikator penanganan balita gizi buruk di tahun 2016 ini mencapai realisasi 100%, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**. Penanganan balita gizi buruk ini dalam penanganannya dilakukan dengan pemberian bantuan PMT (Pemberian makanan tambahan) pemulihan dari dana APBD II Kab dan APBN yaitu bersumber dari dana BOK. Selain itu juga tercapainya target di tahun 2016 ini dikarenakan adanya komitmen dari kepala daerah untuk dapat menanggulangi kasus balita gizi kurang/buruk melalui dana APBD.

- Hambatan dalam melaksanakan indikator ini yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk membawah balita ke posyandu sehingga cakupan penimbangan di posyandu menjadi rendah dibawah target akhirnya mengakibatkan sulitnya penapisan/pelacakan balita yang cenderung akan mengalami gizi kurang/buruk yang berawal dari 2T (2 bulan berturut-turut tidak naik) menjadi BGM lalu menjadi gizi kurang/buruk.
- Upaya Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah di tahun 2016 untuk meningkatkan keberhasilan adalah jika balita diketahui 2 kali berturut-turut tidak



naik berat badannya atau BGM (Bawah Garis Merah) segera dirujuk ke puskesmas. Selain itu, tindak lanjut dilakukan dengan mengacu pada besaran masalah yang terjadi untuk perencanaan program perbaikan gizi balita di wilayah tersebut melalui analisis penyebab masalah serta menentukan prioritas wilayah sasaran dan peningkatan pembinaan.

Sebagai bahan perbandingan di tahun 2015 kasus balita gizi buruk di kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 6 (enam) kasus, di mana kesemua kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Artinya jika berdasarkan jumlah antar tahun 2015 dengan tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 3 kasus balita gizi buruk.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD'45) mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, bahwa dalam mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrument pembangunan nasional di Bidang pemuda dan olahraga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya baik secara jasmaniah, rohaniah dan social dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan konstitusi bangsa Indonesia maka dalam tahap perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga akan fokus terhadap penanganan masalah pemberdayaan pengembangan kreatifitas kepemudaan dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penanganan secara serius, bertahap dan terencana, hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembinaan merupakan aspek terpenting guna mendorong terciptanya pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang berdaya saing dan berkompeten. Pemberdayaan bidang kepemudaan dan bidang olahraga menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :



Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	200	210	210	100	210
2	Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten	120	130	130	100	130

Sumber : Dikpora dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah

1. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016 berjumlah 107.791 jiwa dari jumlah tersebut 36% atau 39.265 jiwa adalah Penduduk yang berusia antara 16 -30 tahun atau kata lain penduduk dalam kelompok pemuda. Angka ini merupakan potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan.

Organisasi Pemuda yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah sekarang adalah KNPI, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain yang pembinaannya dilakukan oleh berbagai Instansi Pemerintah maupun organisasi masyarakat. Sedangkan organisasi keolahragaan berada dibawah koordinasi KONI Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari cabang-cabang olah raga. Belum semua organisasi kepemudaan dan keolahragaan tersebut aktif dalam hal pendekatan masalah baik dibidang pembinaan kedalam maupun kontribusi pemuda terhadap pembangunan.

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran masyarakat seperti maraknya penggunaan Narkoba dan penderita HIV/AIDS, minuman keras, perjudian dan perilaku kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial Generasi Muda lainnya, merupakan masalah yang kompleks yang dapat mengancam masa depan Generasi Muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya.

Meningkatnya jumlah pemuda pengangguran sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berakibatkan kepada masalah tenaga kerja, urbanisasi, lapangan kerja, ketidakpastian iklim usaha, lemahnya kemampuan dan perilaku kewirausahaan di kalangan generasi muda. Masalah kepemudaan ditangani oleh berbagai instansi sehingga dalam



prakteknya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari gambaran umum tersebut diatas, maka diharapkan melalui pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan pada tahun 2016, dapat mewujudkan organisasi yang tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD '45, melalui kader pemuda pembangunan yang berbudi pekerti luhur, dinamis, kreatif, berketrampilan dan mampu membentuk organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri, profesional serta berperan dalam segenap aspek pembangunan daerah maupun nasional yang mengarahkan organisasi pemuda dan olahraga yang berdisiplin dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga” terhadap **indikator Jumlah organisasi pemuda dan olahraga**, dari tahun ke tahun target capaiannya selalu meningkat, yang mana pada tahun 2015 capaian target yang dicapai adalah 200 organisasi pemuda dan olahraga, pada tahun 2016 target capaian dinaikkan lagi menjadi 210 organisasi pemuda dan olahraga terealisasi 210 organisasi pemuda dan olahraga, dari angka tersebut persentase realisasi atas target kinerja yang sudah ditetapkan mencapai 100%, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**.

2. Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah selalu mendukung upaya mengoptimalkan dan mengembangkan olahraga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Semangat pemuda yang menggelora di bidang olahraga harus didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait yang mendukung kemajuan olahraga, menyediakan fasilitas olahraga yang layak dan memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang siswanya mempunyai prestasi olahraga. Kabupaten Bengkulu Tengah walaupun terbilang masih sangat muda namun sudah dapat menunjukkan prestasi yang bisa dibanggakan, baik melalui kompetisi olahraga tingkat pelajar maupun tingkat umum, seperti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga” terhadap **indikator Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten**, dari tahun ke tahun target capaiannya selalu meningkat, yang mana pada tahun 2015 capaian target yang dicapai adalah 120, Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten, pada tahun 2016 target capaian dinaikkan lagi menjadi 130 Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten,



teralisasi 130 Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten, dari angka tersebut persentase realisasi atas target kinerja yang sudah ditetapkan mencapai 100%, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **sangat baik**. Pada tahun 2017 target untuk indikator Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten tetap dipertahankan pada angka yang sama seperti tahun 2016.

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Ketenagakerjaan

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari "memajukan kesejahteraan umum "rakyat Bengkulu Tengah" dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pembinaan keluarga sejahtera.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari Misi 3, "Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya daerah (khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan) dan pemberdayaan rumah tangga sebagai upaya menggerakkan peningkatan kesejahteraan keluarga". Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja ini telah ditetapkan indikator sasaran dan dengan capaian keberhasilannya di sajikan sebagai berikut :

Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	50.932	50.932	31.631	62.1	20.001
2	Persentase peserta KB Aktif	132,38 %	13.558 pus	16.385 pus	142,78	19.358 pus
3	Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja	84,66	76.369	67.713	88.66	97

Sumber : Dinsos, Disnakertran, DP3AP2KB dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah



1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Ginandjar (1993), kemiskinan ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenagakerjaan” terhadap **indikator Persentase penduduk diatas garis kemiskinan**, pada awal tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 50.932 jiwa dan angka ini di tetapkan menjadi target kinerja Dinas Sosial. Dari target realisasi kinerja tersebut target sejumlah 31.631 jiwa atau 62.1% sudah dapat ter entaskan dari kemiskinan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **rendah**. Artinya dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 107.791 jiwa sebanyak ± 87.790 atau 81.44% berada diatas garis kemiskinan. Sedangkan penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan berjumlah 20.001 jiwa akan ditetapkan menjadi target ditahun 2017 nanti.

2. Persentase peserta KB Aktif

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Manfaat Keluarga Berencana adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksi.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenagakerjaan” terhadap **indikator Persentase peserta KB aktif** Pada tahun 2016 Pemerintah



Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan target indikator sasaran persentase peserta KB aktif sebesar 13.558 pasangan usia subur, dalam pelaksanaannya selama tahun 2016 terealisasi sebesar 16.385 pasangan usia subur dengan capaian persentase realisasi sebesar 142,78%, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **sangat baik**, artinya pada tahun 2016 realisasi persentase KB aktif melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 142.78% atau 16.385 pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana. Dari target yang ditetapkan di tahun 2016 terjadi kelebihan capaian sebesar 42,78%, angka ini menggambarkan adanya peningkatan yang luar biasa terhadap jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana. Capaian kinerja ini tercapai dikarenakan adanya upaya yang maksimal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah untuk terus meningkatkan keberhasilan yaitu dengan memfokuskan sasaran pada kategori PUS (Pasangan Usia Subur) dengan “4 terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak) dan penguatan pada pengelola program KB dan penyuluhan di Wilayah Kerja Puskesmas agar mampu menyediakan data dan informasi yang akurat.

Dalam pelaksanaan pencapaian target persentase peserta KB aktif juga menjumpai permasalahan seperti masih ada peserta KB yang memutuskan pemakaian (DO) pada metode jangka pendek dan tidak adanya pemantauan serta masih banyak pasangan yang belum memiliki kesadaran yang mantap untuk ber-KB.

Untuk tahun 2017 target yang ingin terhadap indikator persentase peserta KB aktif sebesar 19.358 pasangan usia subur.

3. Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang tenaga kerja adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja serta rendahnya kompetensi tenaga kerja, akibatnya angkatan kerja yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal. Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Investasi Sektor Industri” terhadap **indikator rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja**.

Pada tahun 2016 target Jumlah Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja adalah 97% atau 76.369 tenaga kerja, dalam pelaksanaannya jumlah Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja terealisasi sebanyak 67.713 atau 88.66%, sehingga persentase realisasi mencapai 88,66% atas target kinerja



yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Tinggi**. Artinya pada tahun 2016 tenaga kerja yang masuk dalam total angkatan kerja yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan adalah sebesar 88.66% atau sebanyak 67.713 tenaga kerja. Sebagai perbandingan pada tahun 2015 capaian target terhadap Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja, adalah 84,66%, artinya ada peningkatan sebesar 4% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 target untuk indikator Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja ditingkatkan lagi menjadi 97%.

Belum tercapainya target realisasi rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja sebesar 97% di tahun 2016 di karenakan terbatasnya lapangan pekerjaan hal ini dikarenakan jumlah angkatan kerja di kabupaten Bengkulu Tengah cukup besar sementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas, sehingga masalah pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun.

Permasalahan pengangguran juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia atau tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penganggur dari tahun ke tahun didominasi oleh golongan tingkat pendidikan rendah seperti SD, SLTP dan SLTA, selain itu dalam rangka memenuhi hak pekerja ditetapkan UMK yang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula, permasalahan yang ada berupa :

1. Pertambahan angkatan kerja yang terus meningkat membutuhkan lowongan pekerjaan yang banyak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Ketrampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Solusi atau jalan keluar yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Bengkulu Tengah adalah dengan mengadakan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan lebih diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pengguna dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus.

10. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau



zat-zat berbahaya lainnya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Pengadaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di daerah ibu kota kabupaten dan sekitarnya, dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun demikian secara keseluruhan jumlah produksi air bersih yang dapat di produksi oleh PDAM kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, berdasarkan data dari BPS (Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016) untuk tahun 2015 baru 3.240 pelanggan yang dapat dipenuhi akan kebutuhan air bersih. Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM Tirta Raflesia umumnya mereka menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air sumber (mata air) dan lainnya. tergantung dari kondisi geografis daerah tempat tinggalnya.

Permasalahan yang timbul yakni sering dijumpai bahwa kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di beberapa tempat bahkan tidak layak untuk diminum. Air yang layak diminum, mempunyai standar persyaratan tertentu yakni persyaratan fisis, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tersebut tidak layak untuk diminum. Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar kualitas tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara langsung dan cepat maupun tidak langsung dan secara perlahan. Permasalahan ini salah satu yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang harus mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu hal yang penting dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2017. Untuk mengukur kinerja sasaran ini telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	3240	100	3.799	63.31	6000
2	Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau jaringan air bersih	30	36	31	86.11	5

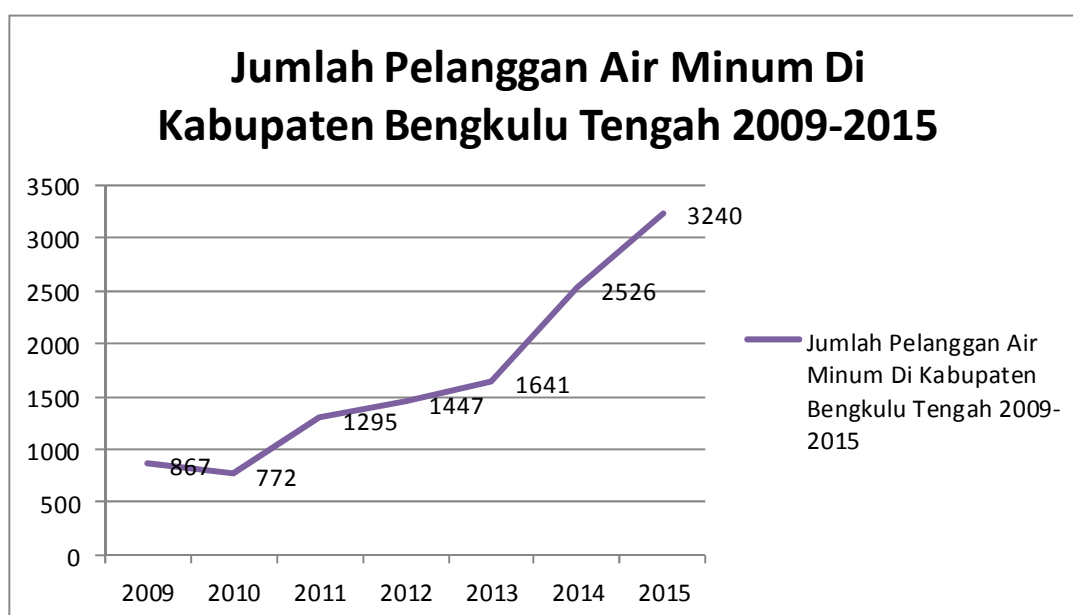
Sumber : PDAM Tirta Raflesia dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah



1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih” terhadap indikator **Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih**, pada tahun 2016 target Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah 100 % dari jumlah target 6000 Rumah Tangga pelanggan, terealisasi sebesar 3.799 rumah tangga pelanggan sehingga persentase capaian realisasi 63.31% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Rendah**. Artinya dari target 6000 rumah tangga pelanggan yang dapat dilayani dengan pasilitas air bersih di tahun 2016 hanya terealisasi 3.799 rumah tangga pelanggan atau 63.11% dari target yang ditetapkan. Belum tercapainya target di tahun 2016 dikarenakan banyak faktor yang belum mendukung seperti kemampuan SDM, kondisi geografis, masalah-masalah lapangan dan yang terpenting adalah keterbatasan anggaran atau dana. Pada tahun 2017 PDAM Tirta Raflesia kembali menargetkan 6000 rumah tangga pelanggan baru yang dapat di distribusikan air bersih, tentu saja dengan perencanaan yang lebih baik, seperti kesiapan SDM, dana, dan kondisi geografi yang masalahnya sudah dapat di antisipasi. Hal ini semua sejalan dengan rencana penambahan perluasan jaringan air bersih dan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ke PDAM Tirta Raflesia di tahun 2017.

Berikut ini gambaran III.12 perkembangan pelanggan PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2009 s/d tahun 2015.



Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016

Gambar III.12 Jumlah Pelanggan Air Minum di Kabupaten Bengkulu Tengah



2. Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau Jaringan Air Bersih

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih” terhadap indikator **Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau jaringan air bersih**, pada tahun 2016 target Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau jaringan air bersih adalah 36 desa/kelurahan, terealisasi sebesar 31 desa/kelurahan yang terjangkau jaringan air bersih sehingga persentase realisasi 86,11% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Tinggi**. Namun jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016) berjumlah 142 desa dan 1 kelurahan, dari 31 atau 21.7% desa/kelurahan yang sudah terjangkau jaringan air bersih berarti masih ada 111 desa/kelurahan atau 78.3% yang belum terjangkau jaringan air bersih dari PDAM Tirta Raflesia. Pada tahun 2017 target untuk indikator ini tetap akan pertahankan menjadi 36 desa/kelurahan yang terjangkau jaringan air bersih.

11. Sasaran meningkatnya Usaha Pertanian

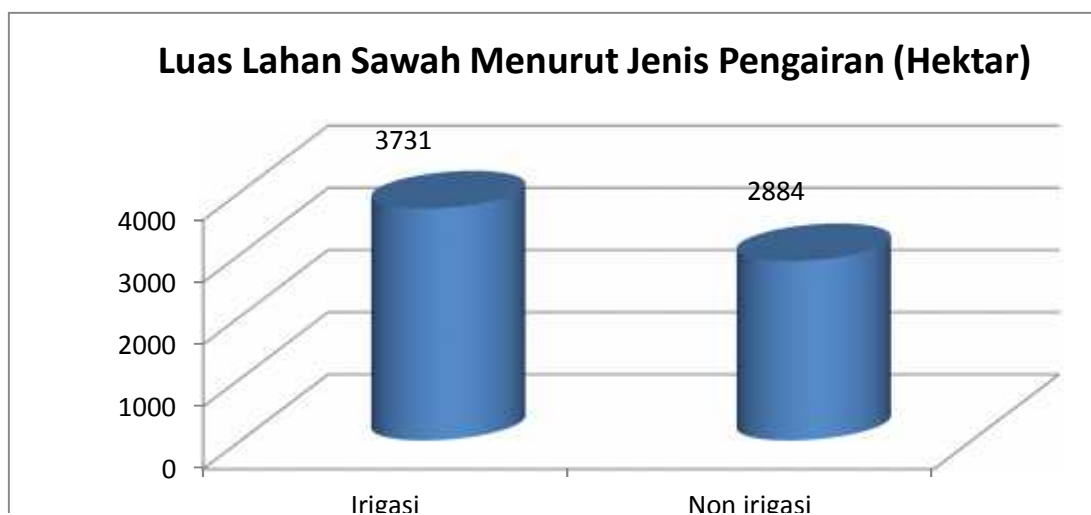
Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB). Pada Tahun 2015 peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah (sumber Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016) adalah 30.00 persen. Dengan nilai nominal 985.669.27 juta rupiah (atas dasar harga berlaku). Adapun cakupan kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan terdiri dari berbagai kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.



Gambar III.13 Panen Raya di Bengkulu Tengah



Pada Tahun 2015, luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 6.615 hektar, sedangkan luas lahan tegal/kebun sebesar 13.979 hektar, lading/huma sebesar 9.274 hektar dan lahan sementara yang tidak diusahakan sebesar 5.459 hektar. Dari jumlah luas lahan sawah 6.615 hektar, sebanyak 3.731 hektar di aliri air melalui pengairan irigasi sedangkan sisanya 2.884 hektar menggunakan air non irigasi.



Gambar III.14 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan

Untuk tahun 2015 berdasarkan data BPS (Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016) produksi padi baik yang berasal dari padi sawa dan padi ladang total produksi yang dapat dicapai sebesar 7.634 ton padi setiap musim panen. Angka produksi padi di Kabupaten Bengkulu Tengah masih dapat terus ditingkatkan melalui program perluasan areal tanaman pangan dan insentififikasi pertanian. Dengan memprioritaskan pencapaian perkembangan usaha tani. Hal ini dilakukan karena mayoritas penduduk kabupaten Bengkulu Tengah adalah petani, karena dengan semakin membaiknya kualitas petani maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun ekonomi secara mandiri, berbasis pertanian. Maka untuk mengukur kinerja sasaran ini telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Usaha Pertanian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam	3,8	4,5	4.0	88.88	4,5
2	Rata-rata peningkatan produksi padi	28.000	36.021	30.768	82	36021

Sumber : Dinas Pertanian dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah



1. Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Usahanya Pertanian” terhadap **indikator rata-rata produksi padi per hektar /musim tanam**, pada tahun 2016 target Rata-rata produksi padi per hektar /musim tanam adalah 4,5 Ton, terealisasi rata-rata produksi padi per hektar/musim sebesar 4 Ton, sehingga capaian persentase realisasi rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam adalah sebesar 88.88% atas target kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Tinggi**. Artinya jika luas lahan sawah di kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan data BPS adalah 6.615 hektar di gunakan secara maksimal untuk tanaman padi, maka produksi padi yang dapat di capai adalah sebesar 26.460 ton padi per musim tanam atau jika dalam satu tahun rata-rata musim tanam 2 kali, maka selama setahun total produksi padi akan mencapai 52.920 ton padi. Angka 52.920 ton padi adalah angka yang sangat diharapkan dan angka ini tidak mustahil akan tercapai jika semua sektor penunjang pertanian khususnya tanaman padi dapat dimaksimalkan, seperti usaha insentififikasi pertanian melalui penggunaan pupuk, bibit unggul, metode pertanian yang unggul dan pengolahan pasca panen yang baik.

Disisi lain tidak tercapainya target rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam sebesar 0.5 ton lebih banyak dikarenakan kondisi alam, cuaca dan serangan hama yang sulit di duga serta masalah kemampuan SDM petani itu sendiri. Pada tahun 2015 capaian target terhadap rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam adalah 3.8 Ton, artinya ada peningkatan dalam jumlah rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam sebesar 0.2 ton. walaupun peningkatan ini tidak signifikan.

Pada tahun 2017 target untuk indikator ini tetap dipertahankan pada angka 4,5 Ton per hektar/musim tanam.

2. Rata-Rata Peningkatan Produksi Padi

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Usahanya Pertanian” terhadap **indikator rata-rata Peningkatan Produksi Padi**. Pada tahun 2016 target rata-rata peningkatan produksi padi adalah 36.021 ton per musim tanam, terealisasi sebesar 30.768 ton per musim tanam, sehingga persentase realisasi yang tercapai adalah sebesar 82 % atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Tinggi**. Artinya produksi padi di Kabupaten Bengkulu Tengah pada musim tanam selama tahun 2016 terjadi peningkatan rata-rata produksi padi sebesar 30.768 ton. Tidak tercapainya target rata-rata Peningkatan Produksi Padi di tahun 2016 disebabkan oleh banyak hal seperti :



1. Masalah lahan dan Air
2. Masalah penggunaan pupuk dan obat-obatan serta racun pembasmi hama
3. Masalah Perubahan Iklim yang sulit di perkirakan
4. Masalah gangguan binatang/hama

Untuk tahun 2017 masalah-masalah yang dihadapi dalam sektor pertanian khususnya kegiatan peningkatan produksi padi akan diatasi dengan berbagai kegiatan seperti :

1. Kegiatan Intensifikasi pertanian
2. Kegiatan Ekstensifikasi pertanian
3. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan dan Penataan/pengaturan penggunaan air irigasi untuk cocok tanam padi dengan lebih baik.
4. Meminimalisir gangguan binatang/hama seperti babi, kera dan burung.
5. Memperkirakan/mendeteksi perubahan iklim dengan lebih tepat.

Dengan melakukan hal-hal diatas diharapkan pada tahun 2017 akan terjadi peningkatan produksi padi yang signifikan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jika di dibandingkan pada tahun 2015 capaian target terhadap Rata-Rata Peningkatan Produksi Padi adalah 28.000 Ton, artinya ada peningkatan rata-rata produksi padi sebesar 2.768 ton pada tahun 2016. Pada tahun 2017 target untuk Rata-Rata Peningkatan Produksi Padi ini sebesar di pertahankan 36.021 Ton.

12. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bengkulu Tengah. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat Koperasi dan UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah cukup menggembirakan dan menjadi salah satu penggerak perekonomian yang penting di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka sejalan dengan itu permasalahan Koperasi dan UMKM juga dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu



Tengah 2012-2017, pada Misi 3 yaitu Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya daerah (khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan) dan pemberdayaan rumah tangga sebagai upaya menggerakkan peningkatan kesejahteraan keluarga. Maka ditetapkanlan sasaran meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM untuk mewujudkan misi tersebut. Peran koperasi dan UMKM sangatlah besar dalam mewujudkan misi ini, karena koperasi dan UMKM adalah bentuk usaha yang sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat baik dilihat dari sisi manfaat dan peran serta masyarakat dalam bidang usaha tersebut.

Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Jumlah koperasi	143	200	186	93.00	200
2	Persentase koperasi aktif	80%	90%	80%	88.88	90%
3	Jumlah UMKM	1213	2.000	1.213	60	2.000

Sumber : Disperindagkop dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah

1. Jumlah Koperasi

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM” terhadap **indikator jumlah koperasi**, Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Pada tahun 2016 target jumlah koperasi yang ditetapkan berjumlah 200 koperasi, pada pelaksanaan di tahun 2016 terealisasi sebanyak 186 koperasi, sehingga persentase realisasi mencapai 93% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Artinya dari target 200 koperasi yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah ditahun 2016 terealisasi sebanyak 186 koperasi atau sebesar 93%. Untuk perbandingan pada tahun 2015 capaian target



terhadap jumlah koperasi adalah 143 artinya ada peningkatan dalam jumlah, peningkatan ini cukup tinggi mencapai 42 koperasi.

Capaian target sebesar 93% ini tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah yang selalu memberikan perhatian yang besar terhadap pertumbuhan dan pembinaan koperasi dan UMKM, hal ini terlihat dari gencarnya dilakukan kegiatan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM, pemberian tambahan modal dan memberi kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk mempromosikan usahanya pada even-even tingkat kabupaten maupun provinsi, selain itu juga usaha pemerintah ini mendapat dukungan dari masyarakat, hal ini tercermin pada besarnya minat masyarakat untuk mendirikan koperasi dan UMKM baru, namun dalam mencapai sasaran ini, Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah berhadapan dengan beberapa masalah, seperti:

1. Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak masyarakat sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar, maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.
2. Perkembangan koperasi biasanya tidak dimulai dari bawah (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Di Daerah, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikannya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.
3. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan



dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.

4. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. contohnya banyak terjadi pada KUD yang notabene di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut karena manajemennya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi KUD yang hanya menjadi tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur. Karena hal itu, maka KUD banyak dinilai negatif dan disingkat Ketua Untung Dulu.
5. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana-dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi "manja" dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan nya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.

Pada tahun 2017 target untuk indikator jumlah koperasi di pertahankan tetap menjadi 200 koperasi.

2. Persentase Koperasi Aktif

Terbentuknya koperasi-koperasi baru sepantasnya mendapatkan apresiasi dan pembinaan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM agar koperasi dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, untuk itu dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM" diperlukan indikator persentase koperasi aktif untuk mengukur keaktifan koperasi yang sudah ada. Pada tahun 2016 target persentase koperasi aktif adalah 90% koperasi, dalam pelaksanaannya terealisasi sebanyak 80% koperasi aktif dari total jumlah koperasi, sehingga persentase realisasi mencapai 88 %. Atas target kinerja yang sudah ditetapkan ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Tinggi**. Artinya dengan capaian target sebesar 88%, maka persentase koperasi yang aktif di kabupaten Bengkulu



Tengah berjumlah 88% saja. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2015 berjumlah 80%, maka terjadi Kenaikan meskipun tidak signifikan.

Pada tahun 2017 target untuk persentase koperasi aktif di pertahankan tetap menjadi 90% koperasi aktif.

Namun, pada kenyataannya, terkadang koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk memberikan berbagai bantuan untuk mendukung peranan koperasi. Bantuan pemerintah tersebut dapat berupa :

1. Memberikan prioritas kepada koperasi untuk melakukan usaha yang diwujudkan dalam bentuk berikut:
 - a. Menjadikan koperasi sebagai rekanan dalam kedinasan.
 - b. Memberikan keleluasaan kepada koperasi untuk melakukan kegiatan usaha seperti hanya badan usaha lain.
 - c. Memberikan peluang kepada koperasi untuk ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional.
 - d. Memberikan bantuan tambahan permodalan kepada koperasi agar lebih mampu meningkatkan usahanya.
2. Memberikan pembinaan terhadap koperasi yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut:
 - a. Menciptakan kondisi dan iklim yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
 - b. Memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan terhadap usaha-usaha koperasi.
 - c. Memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.
 - d. Membantu usaha koperasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan antara koperasi dan badan usaha lain.
 - e. Mengupayakan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain.
 - f. Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi.
 - g. Membantu memperkuat permodalan koperasi.
 - h. Menetapkan usaha yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi untuk melindunginya dari persaingan dengan badan usaha lain.
 - i. Memberikan bantuan konsultasi untuk memecahkan masalah.

3. Jumlah UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam



perkembangannya, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM” terhadap **indikator jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**, pada tahun 2016 target jumlah UMKM yang ditetapkan adalah 2.000 UMKM, terealisasi sebanyak 1.213 UMKM sehingga persentase realisasi adalah 60%. Atas target kinerja yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Rendah**. Pada tahun 2015 capaian target terhadap jumlah UMKM adalah 1.213, artinya capaian pada tahun 2015 dapat dipertahankan walaupun tidak ada kenaikan dan tidak dapat mencapai target sasaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2015. Pada tahun 2017 target untuk indikator ini pertahankan lagi menjadi tetap 2000 UMKM.

Agar di tahun 2017 target terhadap jumlah UMKM dapat terealisasi kita harus berpendapat sama bahwa sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UMKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar daerah, tidak dapat pula di kesampingkan.

Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.



13. Sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Industri

Kebanyakan orang mengasumsikan bahwa industri hanyalah kegiatan ekonomi manusia yang mengolah bahan baku/ bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Padahal pengertian industri sangatlah luas, proses industri ini meliputi semua kegiatan manusia dalam suatu bidang tertentu yang sifatnya produktif dan komersial. Kata industri berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu "industrie" yang berarti aktivitas, tetapi kata tersebut dasarnya berasal dari bahasa latin yaitu "Industria" yang memiliki arti kerajinan dan aktivitas.

Dalam arti luas industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang (manufaktur) tetapi juga dalam bentuk jasa (pelayanan), contoh hasil produksi dalam bentuk jasa seperti misalnya perbankan, asuransi, transportasi, jasa pengiriman barang dan sebagainya.

Sektor industri bukan hanya milik daerah yang sudah berkembang dan maju namun sekarang sektor industri sudah menjadi milik semua daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan, yang membedakannya hanyalah skalanya saja, apakah industri besar atau industri kecil, tidak terkecuali Kabupaten Bengkulu Tengah cukup banyak industri yang berkembang, seperti industri pertambangan, industri perkebunan dan industri kecil rumah tangga serta industri jasa. Sektor industri memberikan manfaat baik penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan hasil bumi/alam sebagai bahan baku industri dan sebagai pemacu perkembangan perekonomian masyarakat. Untuk mengukur kinerja sasaran ini telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

**Tabel III.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Investasi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target RPJMD (2017)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Jumlah perusahaan menengah dan besar	23	50	32	64	70
2	Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan	1.029	1.200	1.179	98%	1.500

Sumber : DPM-PT dan Bag. Organisasi, 2017, data diolah



1. Jumlah Perusahaan Menengah dan Besar

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Investasi” terhadap **indikator jumlah perusahaan menengah dan besar**, pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 50 perusahaan menengah dan besar, terealisasi sebanyak 32 perusahaan menengah dan besar sehingga persentase realisasi mencapai 64% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Rendah**. Artinya pada tahun 2016 terdapat 32 perusahaan menengah dan besar yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkulu Tengah atau 64% dari target yang ditetapkan sebanyak 50 perusahaan menengah dan besar.

Pada tahun 2015 capaian target terhadap jumlah perusahaan menengah dan besar adalah 23 perusahaan, artinya ada peningkatan jumlah perusahaan menengah dan besar yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkulu Tengah, walaupun peningkatan ini tidak signifikan. Cukup besarnya minat para investor menginvestasikan uangnya di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang selalu berusaha memberikan kemudahan berupa regulasi dan perijinan serta rasa aman dalam berinvestasi.

Untuk Tahun 2017 target yang ditetapkan adalah sebanyak 70 perusahaan menengah dan besar yang berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini dapat di capai jika pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus memberikan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha dengan tetap memberikan keuntungan untuk daerah dan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan bisa berupa rasa aman dalam berinvestasi, regulasi yang tidak menyulitkan pengusaha, perijinan, infrastruktur yang baik serta tenaga kerja yang cukup murah.

2. Jumlah Dokumen Perizinan yang dikeluarkan

Selain indikator jumlah perusahaan menengah dan besar, **indikator Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan** juga merupakan alat yang dapat dipakai dalam mengukur capaian sasaran “Meningkatnya Investasi”, pada tahun 2016 target Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan adalah 1.200 Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan, terealisasi sebanyak 1.179 dokumen sehingga persentase realisasi mencapai 98% atas target kinerja yang sudah ditetapkan, ini menunjukkan hasil kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik**. Artinya sampai tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mengeluarkan 1.213 perizinan untuk berusaha, baik industri kecil, menengah dan industri besar.



Pada tahun 2015 capaian target terhadap Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan adalah 1.029 dokumen, artinya ada peningkatan dalam jumlah, walaupun peningkatan ini tidak signifikan.

Pada tahun 2017 target untuk indikator ini ditingkatkan lagi menjadi 1.500 dokumen Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan.



C. Akuntabilitas Anggaran

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang memegang prinsip “Good Governance” Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Tahun Anggaran 2016 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016.

APBD Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2016 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.794.653.045.072,15 dan belanja sebesar Rp.855.428.237.992,17 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 60.775.192.920.02 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa).

Dalam APBD Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2016 untuk anggaran Belanja sebesar Rp. 855.428.237.992,17 realisasi belanja Rp 817.751.176.299,80 dan surplus realisasi belanja Rp.37.677.061.692,37 dan terdapat defisit pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00 sehingga terdapat Silpa Rp. 34.677.061.692,37.

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

**Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016**

Uraian	Jumlah Tahun Anggaran 2015		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A Pendapatan	794.653.045.072,15	779.219.253.229,15	15.433.791.843,00	98.06
Pendapatan Asli Daerah	20.544.187.160,15	24.166.278.613,55	(3.622.091.453,40)	117.63
Dana Perimbangan	635.704.112.430,00	615.515.221.788,00	20.188.890.642,00	96.82
Lain-lain pendapatan yang sah	138.404.745.482,00	139.537.752.827,60	(1.133.007.345,60)	100,82
B Belanja	855.428.237.992,17	817.751.176.299,80	37.677.061.692,37	95.60
Belanja Tidak Langsung	429.970.466.269,17	415.240.588.616,00	14.729.877.653,17	96.57
Belanja Langsung	425.457.771.723,00	402.510.587.683,80	22.947.184.039,20	94.61
C Pembiayaan				



Penerimaan Daerah	63.775.192.920,02	0,00	63.775.192.920,02	0,00
Pengeluaran Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
Surplus (defisit) pembiayaan	60.775.192.920,02	(3.000.000.000,00)	63.775.192.920,02	-4,94
Selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0,00	(41.531.923.070,65)	(41.531.923.070,65)	100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 855.428.237.992,17 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.17 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	429.970.466.269,17	50,26
2	Belanja Langsung	425.457.771.723,00	49,74
	Jumlah	855.428.237.992,17	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah , 2017

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.18 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik	2.367.318.230,-	0,55
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	2.205.461.000,-	0,51
3	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur	112.109.097.350,-	26,35
4	Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	23.117.674.750,-	5,43
5	Terpenuhnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	1.892.965.000,-	0,44
6	Meningkatnya mutu pendidikan	22.437.132.988,-	5,27
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.923.606.300,-	1,15



8	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	1.324.800.000,-	0,31
9	Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenaga kerjaan	1.931.434.900,-	0,45
10	Meningkatnya ketersediaan air bersih	125,000,000	0,02
11	Meningkatnya usaha pertanian	2.812.654.750,-	0,66
12	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, UKM dan perbankan	1.699.565.000,-	0,39
13	Meningkatnya investasi	569,000,000,-	0,13
Jumlah		177.515.708.268,-	41,73
Belanja Langsung Pendukung		247.942.063.455,-	58,27
Total Belanja Langsung		425.457.771.723,-	100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Bagian Organisasi, 2017 data diolah

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 177.515.708.268,- atau sebesar 41,73% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 247.942.063.455,- atau sebesar 58,27% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur dengan besaran anggaran 26,35% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebesar 5,43%. Berikutnya anggaran yang cukup besar adalah meningkatnya mutu pendidikan, yaitu sebesar 5,27%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya investasi sebesar 0,13% dan sasaran Meningkatnya ketersediaan air bersih sebesar 0,02% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 94,61%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,02%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,44%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada 4 program/kegiatan di IKU mencapai 100%. Anggaran pada IKU ini efektif



mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU jumlah UMKM sebesar 55.29%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran penyerapan anggaran yang paling besar yaitu sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar 99.91% dan sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebesar 99.65% dari target. Anggaran pada sasaran ini efektif mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sedangkan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM menyerap anggaran terkecil yaitu 61.22% dari target, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :



Tabel III. 19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Anggaran Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	100	99.40	99.40	184,762,000	184,762,000	100.00%
		Jumlah Perda yang dikeluarkan	10	10	100	784.390.000	749.584.500	95.56%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	CC	100	746.512.230	637.777.960	85.43%
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sedang	Sedang	100	651.652.000	626.051.000	96.07%
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan	10	10	100	294.554.000	294.554.000	100.00%
		Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar	10	10	100	1.910.907.000	1.271.638.694	66.55%
		Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan	62	62	100			
3	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jalan kondisi baik	324,33	252,50	61,04			
		Panjang jalan yang terbangun	230.00	138.25	60,11	75.091.029.700	75.064.015.510	99.96%
		Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi	3.000	2.105	70.17	7.958.495.950	7.878.749.800	99.00%
		Jumlah gedung/kantor yang dibangun	8	6	75	29.059.571.700	28.774.287.240	99.02%
4	Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah	9.971.443.429	9.228.942.859	92.55	1.611.160.000	1.456.885.974	90.42%
		Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	21.506.514.750	20.933.307.491	97.33%
5	Terpenuhnya ketersediaan	Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon	40	37	92.50	112.000.000	112.000.000	100.00%



	infrastruktur komunikasi dan informasi	genggam					
		Jumlah SKPD yang memiliki jaringan Web	28	9	32.14	1.780.965.000	1.758.218.270 98.72%
6	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar	100	96,5	96,5	417.990.000	409.105.800 97.87%
		Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar	9	9	100		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	100	85.5	85,5	21.409.531.988	21.112.747.687 98.61%
		Rasio guru/murid	100	100	100	609.611.000	589.647.750 96.73%
		Angka melek huruf	86.68	86.68	100		
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87	87	100	50,000,000	50,000,000 100.00%
		Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	92	78.72	78.72	272.639.000	270.814.000 99.33%
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100	3	100	4.600.967.300	4.598.521.943 99.95%
8	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	210	210	100	962.500.000	956.340.000 99.36%
		Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten	130	130	100	362.300.000	361.225.000 99.70%
9	Meningkatnya kualitas keluarga dan ketenaga kerjaan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	100	65.30	65.30	54,000,000	48.759.000 90.29%
		Persentase peserta KB aktif	100	142.78	142.78	1.877.434,900	1.373.188.000 73.14%
		Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja	97	88.66	91.40		
10	Meningkatnya ketersediaan air bersih	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	6000	3.779	63.31		
		Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih	36	31	86.11	125,000,000	103.800,000 83.04%
11	Meningkatnya usaha pertanian	Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam	4,5	4,0	88.88	2.812.654.750	2.684.652.154 95.45%
		Rata-rata peningkatan produksi padi	36.021	30.768	85.41		
12	Meningkatnya pertumbuhan	Jumlah koperasi	200	186	93	40.000,000	38.020.000 95.05%
		Persentase koperasi aktif	90	80	88.88	195.036.000	192.701.182 98.80%



13	koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM	2000	1.213	60.65	1.464.529.000	809.790.000	55.29%
	Meningkatnya investasi	Jumlah perusahaan menengah dan besar	50	32	64	314.000.000	311.804.000	99.30%
		Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan	1.200	1.179	98.25	255.000.000	254.706.450	99.88%
Jumlah						177.515.708.268	175.777.873.675	99.02%
Belanja langsung Pendukung						247.942.063.455	226.732.714.008,80	91,44%
Total Belanja Langsung						425.457.771.723,00	402.510.587.683,80	94.61%

Sumber : Badan Keuangan dan Bagian Organisasi, 2017, data diolah



D. Efisiensi Sumber Daya

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten yang masih sangat muda dan RPJMD Tahun 2012 – 2017 merupakan RPJMD pertama, namun demikian di dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan hasil pembangunan guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah terus berusaha secara maksimal agar sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan sebaik-baiknya dengan efektif dan efisien.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 5.39%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.98%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,56%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah UMKM sebesar 44.71%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada 4 (empat) program/kegiatan di IKU 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM efisiensi anggarannya paling besar yaitu 38.78% dari anggaran target. Sedangkan efisiensi anggaran terkecil terdapat pada 4 sasaran strategis dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Indikator Kinerja	Anggaran 2016		% Realisasi	Efisiensi Anggaran	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)	(%)
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	184.762.000	184.762.000	100	0	0
2 Jumlah Perda yang dikeluarkan	784.390.000	749.584.500	95.56	34.805.500	4.44
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	746.512.230	637.777.960	85.43	108.734.270	14.57
4 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	651.652.000	626.051.000	96.07	25.601.000	3.93
5 Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang telah mendapatkan diklat kepemimpinan	294.554.000	294.554.000	100.00	-	0



6	Jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan Tugas Belajar	1.910.907.000	1.271.638.694	66.55	639.268.306	33.45
7	Dokumen Izin Belajar PNS yang dikeluarkan					
8	Proporsi panjang jalan kondisi baik					
9	Panjang jalan yang terbangun	75.091.029.700	75.064.015.510	99.96	27.014.190	0.04
10	Jaringan irigasi yang direhabilitasi	7.958.495.950	7.878.749.800	99.00	79.746.150	1.00
11	Jumlah gedung/kantor yang dibangun	29.059.571.700	28.774.287.240	99.02	285.284.460	0.98
12	Jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah	1.611.160.000	1.456.885.974	90.42	154.274.026	9.58
13	Opini Pemeriksaan BPK	21.506.514.750	20.933.307.491	97.33	573.207.259	2.67
14	Jumlah jaringan komunikasi/stasioner telepon genggam	112.000.000	112.000.000	100.00	0	0
15	Jumlah SKPD yang memiliki jaringan Web	1.780.965.000	1.758.218.270	98.72	22.746.730	1.28
16	Angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan dasar	417.990.000	409.105.800	97.87	8.884.200	2.13
17	Rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar					
18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	21.409.531.988	21.112.747.687	98.61	296.784.301	1,39
19	Rasio guru/murid	609.611.000	589.647.750	96.73	19.963.250	3.27
20	Angka melek huruf					
21	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	50,000,000	50,000,000	100.00	0	0
22	Persentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	272.639.000	270.814.000	99.33	1.825.000	0,67
23	Persentase penanganan balita gizi buruk	4.600.967.300	4.598.521.943	99.95	2.445.357	0.05
24	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	962.500.000	956.340.000	99.36	6.160.000	0,64
25	Jumlah kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten	362.300.000	361.225.000	99.70	1.075.000	0,30
26	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	54,000,000	48.759.000	90.29	5.241.000	9.71
27	Persentase peserta KB aktif	1.877.434,900	1.373.188.000	73.14	504.246.900	26.86
28	Rasio tenaga kerja yang terserap terhadap total angkatan kerja					
29	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih					
30	Jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau air bersih	125,000,000	103.800,000	83.04	21.200.000	16.96
31	Rata-rata produksi padi per hektar/musim tanam	2.812.654.750	2.684.652.154	95.45	128.002.596	4.55
32	Rata-rata peningkatan produksi padi					



33	Jumlah koperasi	40.000.000	38.020.000	95.05	1.980.000	4.95
34	Persentase koperasi aktif	195.036.000	192.701.182	98.80	2.334.818	1.20
35	Jumlah UMKM	1.464.529.000	809.790.000	55.29	654.739.000	44.71
36	Jumlah perusahaan menengah dan besar	314.000.000	311.804.000	99.30	2.196.000	0.70
37	Jumlah Dokumen perizinan yang dikeluarkan	255.000.000	254.706.450	99.88	293.550	0,12
Jumlah		177.515.708.268	175.777.873.675	99.02	1.737.834.593	0.98
Belanja langsung Pendukung		247.942.063.455	226.732.714.008,80	91,44	19.209.349.446.20	8,56
Total Belanja Langsung		425.457.771.723	402.510.587.683,80	94.61	20.947.184.039.20	5.39

Sumber : Badan Keuangan dan Bagian Organisasi, 2017, data diolah



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah, cukup banyak hasil yang dapat dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapat perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 13 (tiga belas) sasaran, 37 (tiga puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-130 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 800-298 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 83.78% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 22 (dua puluh dua) IKU atau sebanyak 59.45% kriteria Sangat Baik, 6 (enam) IKU atau 16,21% kriteria Tinggi, 3 (tiga) indikator atau 8.10% kategori sedang, 5 (lima) indikator atau 13.51% kategori rendah dan 1 (satu) indikator atau 2,70% tercapai dengan kategori sangat rendah. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2017 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program



yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan, hal ini mohon untuk dapat dimaklumi karena Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kabupaten pemekaran yang tergolong masih sangat mudah.

Untuk permasalahan yang masih ada, perlu diupayakan pemecahannya dengan meningkatkan kapasitas kemampuan para aparatur untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terwujud.



Lampiran : 1

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Piagam “ANUBHAWA SASANA DESA” dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Desa Kota Titik, Desa Harapan Makmur, Desa Talang Jambu, Desa Talang Boseng, Desa Talang Pauh, Desa Rindu Hati, Desa Kertapati, dan Desa Sekayun Mudik sebagai Desa Sadar Hukum dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Piagam Penghargaan dari Pimpinan Pusat Generasi Muda Rejang Pat Petulai, sebagai pemateri seminar daerah “LAWAN BAHAYA LATEN KORUPSI UNTUK MENUJU INDONESIA MAKMUR” pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 di Aula Pola BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
3. Anugerah Dokumen Perencanaan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Pangripta Nusantara Tahun 2013, JUARA KETIGA Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 pada tanggal 3 April 2013.
4. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP, sehingga Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil mencapai target perekaman e-KTP lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan, pada tanggal 29 November 2012
5. Piagam Penghargaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan KEPMEN KUKM Nomor : 29/KEP/M.KUKM/V/2013 memberikan penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas jasa dan Dharma Bakti dalam memajukan kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
6. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
7. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
8. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Predikat “CC” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014.



9. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Predikat “CC” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015.
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Atas Penertiban Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota Terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis/Bebas Biaya dan Melaksanakan program-program yang Inovatif dalam Upaya Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 Kategori Pratama.
11. Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tanda penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 235/KEP/G2/2015 Tanggal 15 Juli 2015. Penghargaan atas prestasi yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.



Lampiran 1. Daftar Piagam dan Penghargaan Bupati Bengkulu Tengah

12. Piagam “ANUBHAWA SASANA DESA” dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Desa Kota Titik, Desa Harapan Makmur, Desa Talang Jambu, Desa Talang Boseng, Desa Talang Pauh, Desa Rindu Hati, Desa Kertapati, dan Desa Sekayun Mudik sebagai Desa Sadar Hukum dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
13. Piagam Penghargaan dari Pimpinan Pusat Generasi Muda Rejang Pat Petulai, sebagai pemateri seminar daerah “LAWAN BAHAYA LATEN KORUPSI UNTUK MENUJU INDONESIA MAKMUR” pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 di Aula Pola BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
14. Anugerah Dokumen Perencanaan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Pangripta Nusantara Tahun 2013, JUARA KETIGA Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 pada tanggal 3 April 2013.
15. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP, sehingga Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil mencapai target perekaman e-KTP lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan, pada tanggal 29 November 2012
16. Piagam Penghargaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan KEPMEN KUKM Nomor : 29/KEP/M.KUKM/V/2013 memberikan penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas jasa dan Dharma Bakti dalam memajukan kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
17. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
18. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
19. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.



20. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
21. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
22. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Predikat “CC” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014.
23. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Predikat “CC” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
24. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Predikat “CC” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
25. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Atas Penertiban Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota Terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis/Bebas Biaya dan Melaksanakan program-program yang Inovatif dalam Upaya Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 Kategori Pratama.
26. Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tanda penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 235/KEP/G2/2015 Tanggal 15 Juli 2015. Penghargaan atas prestasi yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
27. Piagam Penghargaan National Procurement award 2016, Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE dari LKPP-RI